

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

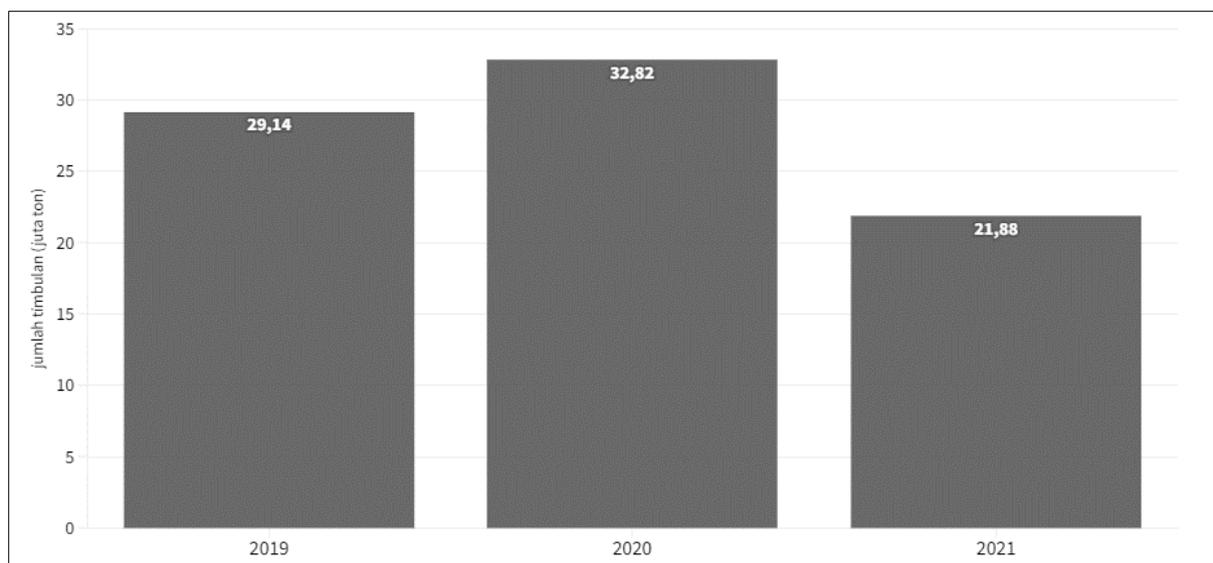
Negara Indonesia dari tahun - ketahun terus mengalami pembangunan. Pembangunan negara ini bertujuan meningkatkan fasilitas dan untuk menunjang kebutuhan masyarakat negara. Negara memiliki prioritas pembangunan nasional yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024. Sasaran dari Pembangunan Jangka Menengah ini yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia kepada arah yang lebih mandiri, adil maju serta makmur dengan cara melalui percepatan pembangunan diberbagai sektor bidang yang menekankan pada struktur perekonomian yang kokoh serta didukung oleh bidang sumber daya manusia yang berkualitas serta memiliki daya saing. Pertumbuhan negara ini dan perkembangan negara ini meningkatkan pula pada kebutuhan setiap masyarakatnya untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Kebutuhan yang meningkat ini dapat mengakibatkan meningkatnya dimensi sampah. Sampah sendiri merupakan suatu hal yang berada didalam kehidupan masyarakat sehari – hari. Sampah merupakan permasalahan disektor lingkungan yang sering terjadi. Sampah sendiri memiliki berbagai macam seperti sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3 sebagai sampah yang memiliki kandungan kimia.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah pada pasal 1 Sampah merupakan sisa dari kegiatan sehari – hari masyarakat atau proses dari alam yang berbentuk padat. Sampah sendiri bersumber dari timbulan sampah. Sukmono dan Rahayu(2013) megemukakan bahwa sampah adalah bahan buangan yang dianggap sudah tidak berguna dan perlu adanya pengelolaan sehingga tidak membahayakan bagi lingkungan serta kesehatan masyarakat. Namun bila melihat kelapangan permasalahan pada kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah masih kurang baik pada pengelolaan sampah organik maupun sampah anorganik. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik dengan bersumber dari Statistik Lingkungan Hidup Indonesia tahun 2018 diketahui bahwa hanya beberapa dari sebagian rumah tangga yang melakukan daur ulang sampahnya. Sementara pada rumah tangga lainnya dengan melalui metode cara dibakar, padahal dengan cara dibakar tersebut dapat memberikan dampak negatif yaitu terjadinya polusi udara sehingga memberikan dampak yang kurang baik bagi masyarakat lainnya.

Berdasarkan dari litbang Kemendagri terdapat riset dari Kementerian Kesehatan yang diketahui bahwa data mengenai kepedulian Masyarakat mengenai sampah hanya 20% dari total masyarakat negara Indonesia yang peduli kepada kebersihan dan kesehatan. Maka dari data tersebut terdapat 52 juta jiwa manusia di Indonesia yang memiliki kepedulian serta kebersihan terhadap lingkungan dan dampak terhadap kesehatan di Indonesia dari total 262 Juta Jiwa di Indonesia. Pencemaran pada lingkungan hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti penambahan pada populasi manusia sehingga meningkatkannya volume sampah yang dibuang, selain itu ditambahkan faktor pada fasilitas pembuangan sampah yang belum merata ataupun belum optimal serta ditambahkan mengenai kesadaran masyarakat mengenai kesadaran sampah.(Sari,2016).

Gambar 1.1

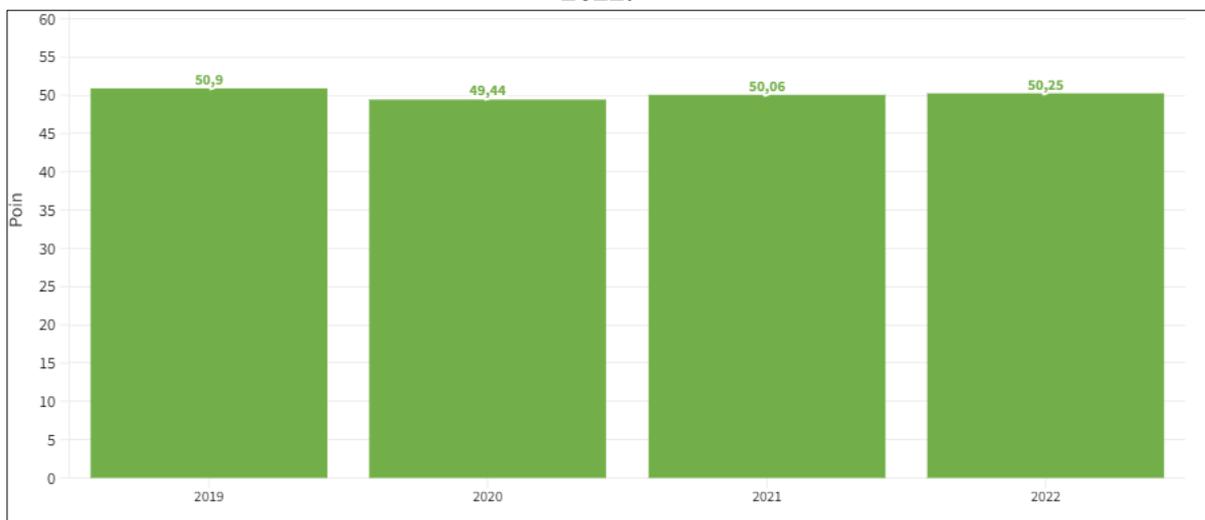
Jumlah Timbulan Sampah Tahunan Indonesia Tahun 2019 – 2021.



Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat bahwa negara Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 29,14 juta ton pada tahun 2019 lalu mengalami kenaikan ditahun 2020 yaitu sebesar 32,82 juta ton dan mengalami penurunan pada tahun 2021 yaitu 21,88 juta ton. Berdasarkan datanya, provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang menjadi sampah terbesar pada tahun 2021 yaitu sebesar 3,65 juta ton sementara pada posisi kedua yaitu dari provinsi Jawa Timur dengan perolehan sampah sebesar 2,64 juta ton sampah(Mahdi.M.I,2022).

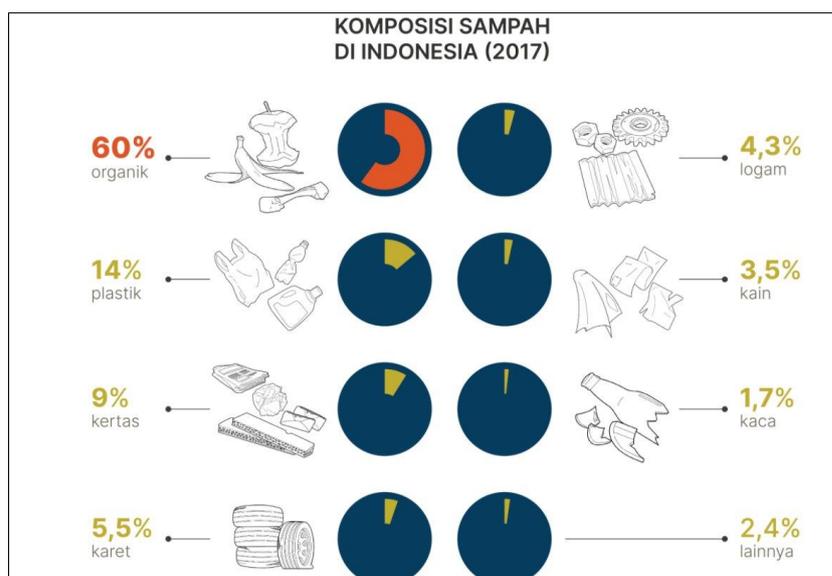
Gambar 1.2
Capaian Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah di Indonesia tahun 2019 hingga 2022.



Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LKHK) pada pengelolaan sampah di Indonesia yaitu pada tahun 2022 sebesar 550,25 poin dengan kenaikan poin sebesar 0,38% dari tahun 2021 yaitu poin 50,06 poin. Bila dilihat dari tahun 2019 hingga tahun 2022 mengalami data yang fluktuatif selama empat tahun ini. Sampah yang dalam bentuk berbahaya yang memiliki kandungan bahan kimia yaitu Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yaitu dikelola sebesar 5,53 juta ton ditahun 2022(Widi,2023).

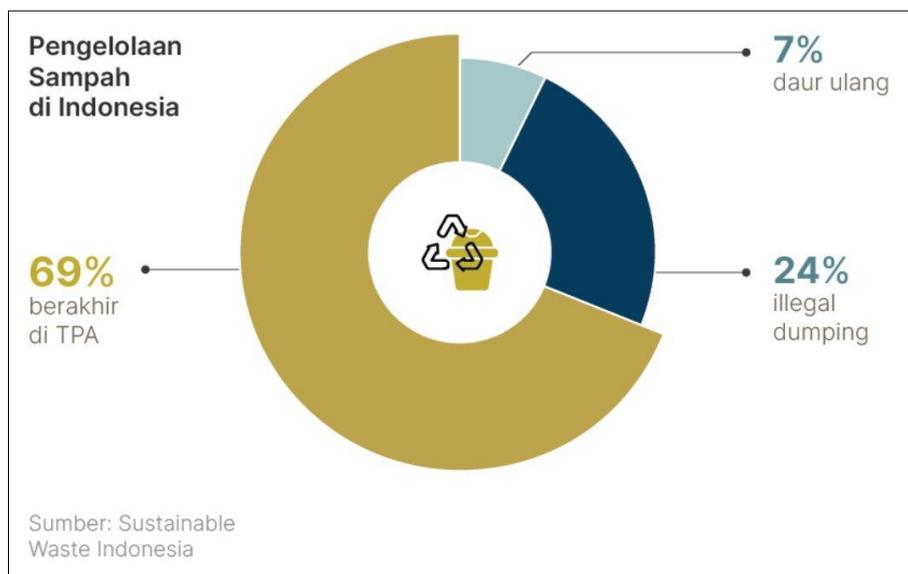
Gambar 1.3
Komposisi Sampah di Indonesia tahun 2017



Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Gambar 3. Merupakan bentuk komposisi Sampah di Indonesia pada tahun 2017 yang bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Jumlah dalam komposisi sampah ini yaitu Organik sebesar 60%, Plastik 14% dan 9% yaitu dari kertas.

Gambar 1.4
Pengelolaan Sampah di Indonesia



Sumber : *Sustainable Waste Indonesia*.

Berdasarkan data dari gambar 4 dengan bersumber dari *Sustainable Waste Indonesia* pada Pengelolaan Sampah di Indonesia sebesar 69% berakhir pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sementara sebesar 7% sampah dilakukan daur ulang untuk dapat digunakan kembali, dan Sebesar 24% Sampah dilakukan berupa illegal dumping pada Tempat Pembuangan pada lokasi yang illegal ataupun lokasi yang tidak memiliki izin.

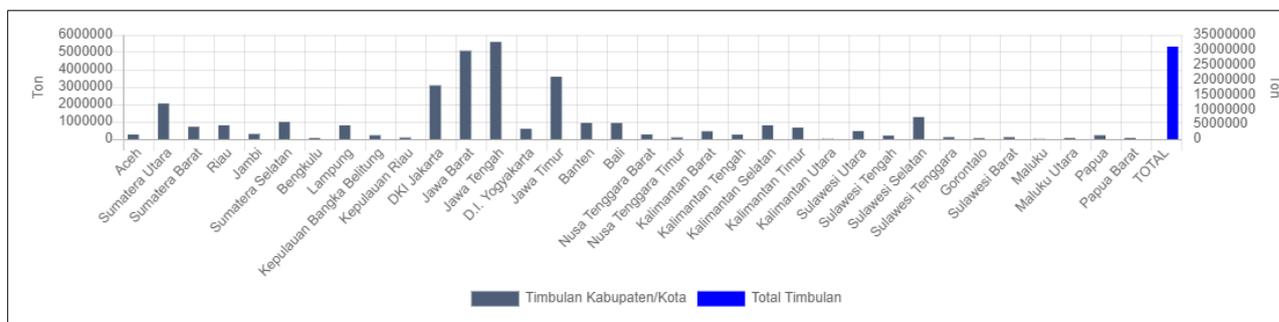
Pengelolaan Sampah telah diatur oleh Pemerintah pusat yaitu pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Direktorat Penanganan Sampah pada Peraturan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Pada pasal 3 pengelolaan sampah diselenggarakan dengan berdasarkan pada asas berkelanjutan, tanggung jawab, manfaat, kesadaran, keadilan, kebersamaan, keamanan, keselamatan dan dari asas nilai ekonomi. Tujuan dari pengelolaan sampah telah dijelaskan pada pasal 4 yaitu bertujuan untuk dapat meningkatkan pada kesehatan masyarakat setempat serta kualitas lingkungan yang menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pemerintah Indonesia menjalankan desentralisasi bertujuan untuk setiap pemerintah daerah dapat menjalankan pemerintahannya secara optimal sesuai dengan

kemampuan setiap daerahnya yang dimiliki. Pemerintah Pusat menerapkan desentralisasi ini bertujuan untuk pembangunan daerah. Telah dijelaskan didalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah pada pasal 5 yaitu Pemerintah pusat serta pemerintah daerah memiliki tugas dalam menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah dengan baik serta berwawasan lingkungan yang sesuai dengan tujuan daripada yang dimaksud didalam undang – undang Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

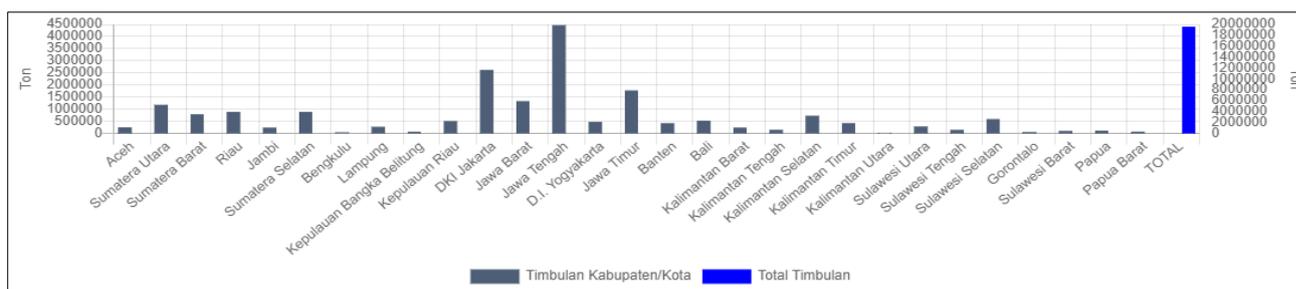
Timbulan sampah selain tingkat nasional terdapat timbulan sampah tingkat provinsi di Indonesia yang dijelaskan pada gambar 1.5 dan gambar 1.6.

Gambar 1.5
Timbulan Sampah tingkat Provinsi Tahun 2021



Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional

Gambar 1.6
Timbulan Sampah tingkat Provinsi Tahun 2022



Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional

Berdasarkan data dari gambar 1.5 dan gambar 1.6 yang bersumber dari website resmi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional didapatkan sebuah data dari tahun 2021 hingga 2022 bahwa timbulan sampah tertinggi nasional yaitu Jawa Tengah dengan tahun 2021 yaitu sebesar 5.000.000 Ton dan pada tahun 2022 sebesar 4.000.000 Ton dan

menjadi timbulan sampah nomor 1 sensasional dari tahun 2021 hingga 2022. Dan yang menjadikan mengambil lokasi di daerah provinsi Jawa Tengah.

TABEL 1.1

Tingkat Sampah masuk ton/tahun tingkat kabupaten di Jawa Tengah tahun 2022

No	Tahun	Provinsi	Kabupaten/Kota	Sampahmasuk (ton/thn)
1	2022	Jawa Tengah	Kab. Banyumas	58.600,75
2	2022	Jawa Tengah	Kab. Purbalingga	40.880,00
3	2022	Jawa Tengah	Kab. Kebumen	98.984,35
4	2022	Jawa Tengah	Kab. Purworejo	22.984,05
5	2022	Jawa Tengah	Kab. Wonosobo	38.325,00
6	2022	Jawa Tengah	Kab. Boyolali	30.112,50
7	2022	Jawa Tengah	Kab. Klaten	35.366,31
8	2022	Jawa Tengah	Kab. Sukoharjo	74.500,15
9	2022	Jawa Tengah	Kab. Wonogiri	18.302,20
10	2022	Jawa Tengah	Kab. Grobogan	27.740,00
11	2022	Jawa Tengah	Kab. Blora	103.415,45
12	2022	Jawa Tengah	Kab. Rembang	13.932,63
13	2022	Jawa Tengah	Kab. Pati	61.283,50
14	2022	Jawa Tengah	Kab. Jepara	59.349,00
15	2022	Jawa Tengah	Kab. Demak	32.850,00
16	2022	Jawa Tengah	Kab. Semarang	75.098,75
17	2022	Jawa Tengah	Kab. Kendal	59.649,69
18	2022	Jawa Tengah	Kab. Pemalang	120.450,00
19	2022	Jawa Tengah	Kab. Brebes	48.577,85

Sumber : Data SIPSN Jawa Tengah Tahun 2022.

Berdasarkan tabel 1.1 Menunjukkan bahwa Kabupaten Pemalang menempati pertama dalam sampah masuk dengan ukuran 120.450 Ton/tahun dan Kabupaten Blora nomor dua dengan ukuran 103.415,45 Ton/Tahun. Di kabupaten Pemalang memiliki Tempat pembuangan Akhir dengan berlokasi di TPA Pesalakan Pemalang dan Tempat Pembuangan Sementara yang berjumlah 6 yang berada di Bakubapten Pemalang (DLH Pemalang, 2018). Sementara untuk Kabupaten Blora memiliki jumlah Tempat Pembuangan Akhir yang di Kecamatan Blora dan Kecamatan Cepu(Bloranews.com, 2022) dan TPS untuk kecamatan Blora sebanyak 5 buah dan Cepu sebanyak 13 Buah(Yudianto,2020).

Berdasarkan Berita Pemalang.go.id Kabupaten Pemalang mengatasi permasalahan sampah edengan menyiapkan TPA baru(pemalanngkab.go.id, 2023). Selin itu pemkab juga melakukan rencana kerjamsma dengan negara asing dalam penanganan sampah(Pemalangkab.go.id). Sementara ntuk urutan kedua sampah tertinggi di jawa Tengah

Kabupaten Blora dengan berdasarkan jurnal Kesehatan Indonesia bahwa permasalahan di Kabupaten Blora mengenai pengelolaan masih terus meningkat. Pemerintah Kabupaten Blora terus melakukan berbagai cara dalam menangani permasalahan penanganan sampah. Permasalahan sampah yang terjadi di Kabupaten Blora ini berdasarkan Jurnal Kesehatan Indonesia berupa adanya keterbatasan pada dana operasional serta sarana didalam pengelolaannya (Yudianto, 2020). Berdasarkan penelitian terdahulu yaitu tentang Implementasi Kebijakan dan Strategi pengelolaan Sampah di Kabupaten Blora terdapat tingkat kepuasan pelanggan pelayanan persampahan Rumah Tangga di Kabupaten Blora.

Tabel 1. 2

Tingkat Kepuasan Pelanggan Pelayanan Persampahan Rumah Tangga di Kabupaten Blora.

No	Unsur Pertanyaan	Nilai Per unsur	Nilai Rata-rata per unsur	Mutu	Nilai Rata-rata Tertimbang Per unsur
1	Prosedur Pelayanan	259	2,590	B	Puas
2	Persyaratan Pelayanan	257	2,570	B	Puas
3	Kejelasan Petugas	258	2,580	B	Puas
4	Kedisiplinan Petugas	255	2,550	B	Puas
5	Tanggung jawab petugas	254	2,540	B	Puas
6	Kemampuan Petugas	252	2,520	B	Puas
7	Kecepatan pelayanan	253	2,530	B	Puas
8	Keadilan	251	2,510	B	Puas
9	Kewajaran Biaya	213	2,130	C	Kurang puas
10	Ketepatan Jadwal	204	2,040	C	Kurang puas
11	Kondisi infrastrukural	192	1,920	C	Kurang puas
12	Kondisi Fisik Petugas	162	1,620	D	Tidak Puas
13	Penyampaian Keluhan	169	1,690	D	Tidak Puas
14	Ketepatan lokasi TPS/TPA	151	1,510	D	Tidak Puas
Total Nilai Rata-rata tertimbang per unsur					3,474
Nilai IKM Konversi Unit Pelayanan					86,858
Mutu Pelayanan					Memuaskan

Sumber : Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia, implementasi kebijakna dan strategi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Blora, 2021

Berdasarkan tabel diatas pada tingkat kabupaten Blora dalam kondisi insfrastruktur serta ketepatan lokasi TPS maupun TPA dan penyampaian keluhan masih tergolong kurang puas serta tidak puas dengan niali C dan D.

Kabupaten Blora merupakan kabupaten yang secara geografis terletak di provinsi Jawa Tengah pada sebelah ujung timur yang langsung berbatasan oleh provinsi Jawa Timur. Kabupaten Blora memiliki 16 kecamatan serta 271 Desa. Pada penelitian ini mengambil daerah Kecamatan Cepu.

Kabupaten Blora dalam melakukan pengelolaan sampah mengikuti peraturan Daerah Kabupaten Blora yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah. Pengelolaan sampah pada kabupaten Blora ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2021 bahwa dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah maka dapat dilakukan dengan metode maupun teknik yang berwawasan lingkungan sehingga tidak memberikan dampak yang buruk maupun negatif terhadap kesehatan masyarakat setempat dengan mengubah pada paradig serta perilaku masyarakat terkait sampah.

Peraturan Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah memuat pokok pikiran yang menjadi sebuah latar belakang didalam pembuatan perundangan tersebut yaitu dengan bertambahnya pendudukan serta perubahan pada pola konsumsi masyarakat di daerah kabupaten Blora maka bertambahnya pula jenis, volume serta karakter dari sampah yang beragam. Selain itu dalam mewujudkan kebersihan lingkungan serta melakukan pengelolaan sampah dengan cara yang komprehensif serta terpadu sehingga mampu memberikan manfaat pada perekonomian, sehat untuk masyarakat, dan keamanan bagi lingkungan dan mampu merubah pada perilaku manusia.

Didalam peraturan Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah ini telah dijelaskan didalam pengelolaan sampah telah ada kepastian hukum, kejelasan dalam tanggung jawab pengelolaan sampah serta kewenangan dari pemerintah daerah, peran dari masyarakat dan dari dunia usaha maka pengelolaan sampah mampu berjalan dengan efektif serta efisien. Dengan pokok pikiran yang menjadi latar belakang Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2011 dibentuknya peraturan daerah tentang Pengelolaan Sampah. Dalam peraturan Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah mengingatkan dari Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan daerah – daerah kabupaten dalam lingkungan provinsi Jawa Tengah untuk mampu menjalankan urusan dan kewajiban – kewajiban lainnya setiap daerahnya.

Kabupaten Blora juga menjalankan peraturan daerah nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah yang dimana peraturan tersebut memuat pokok pikiran yang berdasarkan peraturan pemerintah nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga serta Sampah sejenis

sampah rumah tangga selain itu tentang peraturan pemerintah no 27 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik untuk dapat diselaraskan pada regulasi di daerah dengan cara dinamika serta perkembangan kebutuhan masyarakat. Peraturan pengelolaan sampah kabupaten Blora ini menjadikan pokok pikiran dari undang- undang no 36 Tahun 2009 tentang kesehatan bahwa kesehatan merupakan hak dari manusia dan menjadi unsur kesejahteraan masyarakat yang wajib diwujudkan. Dalam upaya pembangunan daerah maupun negara perlu dilandasinya berupa wawasan kesehatan untuk dapat memperhatikan kesehatan masyarakat serta menjadi tanggun jawab baik pada pemerintahan maupun pada masyarakat.

Ditetapkan kebijakan pada Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2021 ini bermaksud untuk setiap masyarakat memiliki hak dapat hidup dengan lingkungan yang bersih, nyaman serta sehat sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mampu berdampak baik seperti terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Blora didalam menyelaraskan peraturan dari pemerintah pusat yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik serta dalam rangka menyelaraskan regulasi di daerah dengan perkembangan, dinamika dan kebutuhan masyarakat maka dilakukannya perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah.

Kabupaten Blora dalam menjalankan kebijakannya Pengelolaan Sampah berlandaskan Pasal 18 ayat 6 Undang Undang Dasar 1945 sebagai pemerintah Daerah berwenang didalam menetapkan peraturan daerah serta peraturan lainnnya untuk dapat melaksanakan otonomi dan tugas pembantuannya dalam rangka menjalankan urusan tersebut seperti pengelolaan sampah. Menjalankan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan sampah Kabupaten Blora dengan berdasarkan dari Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa kependudukan Indonesia selalu bertambah serta terdapat perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat menimbulkan bertambahnya jenis, volume serta karakteristik sampah yang semakin beragam. Sampah sendiri menjadi sebuah permasalahan nasional maka didalam pengelolaannya perlu dilakukannya dengan

terpadu dan komprehensif sehingga mampu memberikan manfaat kepada masyarakat secara ekonomi, kesehatan serta dapat merubah pada perilaku masyarakat yang lebih baik.

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah menimbang dari Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Sampah sejenis sampah rumah tangga merupakan sampah rumah tangga dengan berasal dari kawasan industri, komersial, khusus serta baik fasilitas social maupun fasilitas umum ataupun fasilitas lainnya. Tujuan ini yaitu untuk mampu menjaga pada kelestarian fungsi dari lingkungan hidup maupun pada kesehatan masyarakat serta menjadikannya sampah sebagai sumber daya.

Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pasal 5 ayat 1 yaitu arah kebijakan dari pengurangan dan penanganan sampah dan program pengurangan serta pada penanganan sampah tersebut. Didalam pasal 5 ayat 2 yaitu target pada pengurangan timbulan sampah serta prioritas jenis sampah dengan cara bertahap dan target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu. Selain itu didalam kebijakan pengelolaan Sampah ini berlandaskan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah yang sekarang telah dirubah didalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah.

Dalam kebijakan pengelolaan sampah ini Pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki tugas serta wewenang didalam pengelolaan sampah. Tugas dan wewenang telah tertuang didalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Berdasarkan pasal 6 dijelaskan bahwa pemerintah pusat serta pemerintah daerah harus menumbuhkembangkan serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam urusan pengelolaan sampah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan penelitian didalam pengembangan teknologi penguraian sampah serta dalam penanganan sampah, pemerintah juga harus mampu memfasilitasi, mengembangkan dan mampu melaksanakan dalam upaya penanganan, pengurangan dan pemanfaatan sampah. Pemerintah daerah didalam pelaksanaan pengelolaan sampah seta

memfasilitasi berupa penyediaan prasarana dan sarana untuk pengelolaan sampah. Pemerintah daerah juga memfasilitasi pengembangan manfaat dari hasil pengelolaan sampah dan melakukan koordinasi antar lembaga seperti pemerintah, masyarakat serta dunia usaha sehingga terdapat keterpaduan didalam pengelolaan sampah.

Didalam pengelolaan sampah kabupaten Blora telah ditetapkannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah yaitu pasal 23 ayat 2 yaitu pemerintah daerah wajib dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah yaitu dengan menetapkan target pengurangan sampah dengan bertahap didalam jangka waktu tertentu, pemerintah daerah memberikan fasilitas berupa penerapan teknologi dengan sifat yang ramah lingkungan, memfasilitasi berupa label produk yang ramah lingkungan, memfasilitasi berupa kegiatan dengan menggunakan daur ulang serta pemerintah juga memberikan fasilitas berupa memasarkan produk yang ramah lingkungan. Dalam pengelolaan sampah juga telah dijelaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah dan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan sampah bahwa Pemerintah serta pemerintah daerah didalam pelaksanaannya dapat kerja sama dengan kemitraan sebagaimana yang telah tertera pada Bab XI pasal 27 dan pasal 28. Pemerintah juga memiliki kewajiban dalam memberikan sarana dan prasana mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah.

Pemerintah dalam kebijakan pengelolaan sampah ini memiliki kewenangan berdasarkan pasal 8 diperaturan daerah kabupaten Blora No 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah bahwa pemerintah daerah mengatur dalam pengelolaan sampah baik dari sumber sampah tersebut hingga TPS dan TPA dengan kriteria serta standar minimal pada lokasi penanganan sampah, menetapkan pada kebijakan serta strategi pengelolaan sampah dengan berdasarkan oleh kebijakan baik nasional maupun provinsi, pemerintah daerah juga dalam pengelolaan sampah disesuaikan dengan norma, prosedur, standard dan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. Pemerintah daerah turut memiliki kewenangan dalam pembinaan serta pengawasan kepada pengelolaan sampah mengenai kiernja yang dilakukan oleh pihak lain selain itu juga menetapkan lokasi untuk penampungan sementara sampah serta tempat pengolahan sampah terpadu maupun pada tempat akhir sampah. Pemerintah daerah juga melakukan evaluasi berkala dalam pelaksanaan pengelolaan sampah.

Peraturan daerah kabupaten Blora No 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan daerah Npmor 1 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah juga diatur dalam pengelolaan sampah daerah berdasarkan pasal 11 bahwa setiap orang wajib untuk dapat menjaga serta memelihara pada kebersihan lingkungan selain itu melakukan pada pengurangan serta pada penanganan sampah dengan sesuai terhadap ketentuan perundang – undangan. Selain itu pada pasal 11 juga dijelaskan bahwa pengelola pada fasilitas umum, perkantoran, perusahaan, fasilitas social serta pada rumah tangga wajib untuk menyediakan tempat pembuangan sampah maupun TPS. Sementara pada pasal 9 juga dihelaskan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam kegiatan pengurangan sampah dengan cara menetapkan sebuah target mengenai pengurangan sampah dengan cara bertap, memberikan fasilitas berupa label produl ramah lingkungan serta memberikan fasilitas berupa kegiatan daur ulang sampah dan memberikan fasilitas berupa produk daur ulang yang dipasarkan.

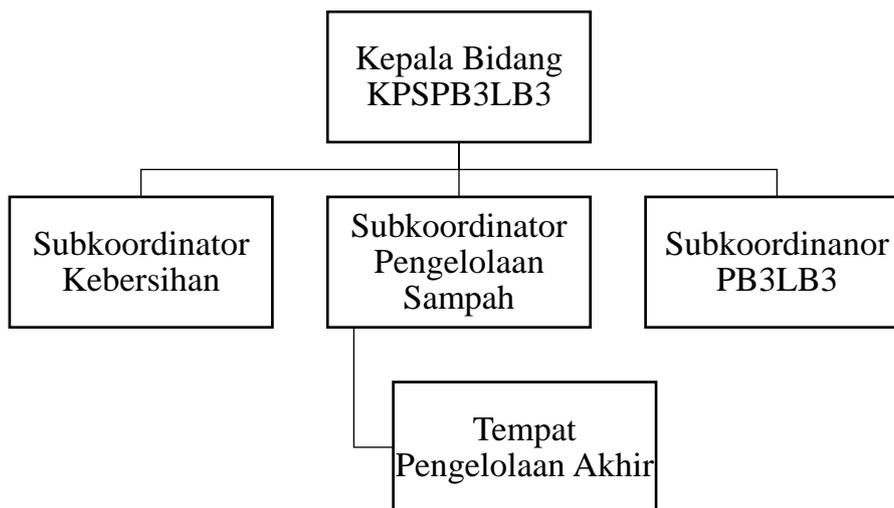
Didalam peraturan daerah kabupaten Blora No 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan daerah Npmor 1 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah pasal 5 juga dijelaskan ruang lingkup pengelolaan sampah di pemerinttah daerah ini terdiri dari sampah rumah tangga, sampah dengan sejenis sampah rumah tangga serta sampah spesifik. Samaph rumah tangga sendiri dijelaskan pada pasal 5 nomor 2 yaitu sampah rumah tangga merupakan sampah yang berasarkan dari kegiatan didalam rumah tangga. Pasal 9 juga dijelaskan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memberikan fasilitas berupa pemilahan sampah semperti sampah *organik*, sampah *non organik* serta sampah B3. Selain itu pemerintah daerah juga turut memberikan tanggung jawab berupa mentiadakan fasilitas kepada masyarakat serta pada dunia usaha didalam kegiatan pada 3R serta memberikan sarana mengenai pengeloalan sampah yang memadai.

Berdasarkan data dari Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia, Timbulan sampah kabupaten Blora memiliki volume pada jenis sampahnya. Seperti sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga yaitu 1000 m³/hari sementara pada timbulan sampah yang spesifik yaitu 103m³/hari dan sampak spesifik yaitu sebanyak 8,5m³/hari sehingga bila ditotal dengan jumlah keseluruhannya yaitu sekitar 72% yang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)(Yudianto,dkk,2021). Sementara Tempat Pembuangan Akhir di Kabupaten Blora hanya ada dua tempat yaitu TPA kecamatan Blora dan Kecamatan Cepu(Bloranews.com, 2020). Bila dari kebijakan dari pengelolaan sampah pada kabupaten Blora sendiri berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan

Persampahan yaitu sampah tersebut dikumpulkan lalu diangkut oleh petugas sampah yang akan diangkut dan berakhir pada pembuangan Akhir TPA(Yudianto,dkk,2021).

Kabupaten Blora serta Kecamatan Cepu sendiri mengenai dinas pada strukturnya yaitu berupa :

Tabel 1.3
Struktur organisasi Dinas Lingkungan Kesehatan di Kabupaten Blora.



Sumber : Hasil wawancara Narasumber Dinas Lingkungan Hidup Sub Koor Pengelolaan TPA Blora, 2023

Berdasarkan struktur tersebut pada pengelolaan sampah berada pada bidang KPSPB3LB3. KPSPB3LB3 sendiri merupakan kepanjangan dari Kebersihan Pengelolaan Sampah Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Limbah Bahan Bahaya dan Beracun. Dan dari Bidang tersebut terdapat 3 divisi dibawahnya yaitu bidang kebersihan, bidang pengelolaan sampah dan B3. Pada kepengurusan lapangan dan kepengurusan pengelolaan sampah yaitu TPA berada pada divisi bagian Bidang pengelolaan sampah yang dikordinasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora kepada seluruh kecamatan di Kabupaten Blora. Pengelolaan Kecamatan Cepu sendiri dalam pengelolaan sampah ini dikomando juga oleh Bidang KPSP3LB3 yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan dipimpin oleh SubKor Pengelolaan TPA Blora.

Tabel 1.4
Timbulan Sampah Kabupaten Blora tahun 2020 hingga 2022.

No	Tahun	Kabupaten	Timbulan sampah harian (Ton)	Timbulan Sampah Tahunan (Ton)
1	2020	Kabupaten Blora	371,42	135.568,25
2	2021	Kabupaten Blora	226,85	82.801,58
3	2022	Kabupaten Blora	383,05	139.811,75
TOTAL			981,32	358.181,58

Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional

Dari tabel 2 mengenai timbulan sampah Kabupaten Blora berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah didapatkan data berdasarkan sistem informasi pengelolaan sampah nasional bahwa kabupaten Blora dari tahun 2020 hingga tahun 2022 mengalami fluktuasi dengan total dari tahun 2020 hingga tahun 2022 sebesar 358.181,58 Ton.

Tabel 1.5
Jumlah Sumber Daya Manusia Kabupaten Blora Berdasarkan bidang dibawah KPSPB3LB3 Tahun 2023

No	Bidang	Daerah	Jumlah
1	Subkooor Kebersihan	Kabupaten Blora	109
2	Subkooor Pengelolaan Sampah	Kabupaten Blora	23
3	Subkooor PB3LB3	Kabupaten Blora	2
4	TOTAL		134

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora tahun 2023

Berdasarkan tabel 3 tersebut didapatkan sebuah data bahwa dibawah bidang KPSPB3LB3 yaitu terdapat tiga sub bagian dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Blora. Tabel diatas menampilkan mengenai Jumlah petugas di Kabupaten Blora yaitu berdasarkan subkooor Kebersihan berjumlah 109, pengelolaan sampah berjumlah 23 dan PB3LB3 yaitu berjumlah 2.

Sementara permasalahan pada Kabupaten Blora sendiri yaitu pada tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora melakukan pembatasan mengenai penggunaan plastic pada tempat pusat perbelanjaan hal tersebut disebabkan oleh produksi sampah plastic pada wilayah Kabupaten Blora cukup tinggi. Berdasarkan portal berita *Suara*

Merdeka.com Sebesar 25 Ton Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kecamatan Blora dan Kecamatan Cepu yaitu terdapat 30% yaitu sampah dengan tipe plastik(Sampurno,2019). Sementara pada tahun 2021 Kabupaten Blora jumlah produksi sampah mencapai lebih dari 30 Ton sampah hal ini termasuk pada kecamatan Cepu serta kecamatan lainnya. Berdasarkan *Suara Merdeka.com* sementara rata – rata pada setiap harinya sampah di Blora sendiri mencapai 34Ton yang masuk pada Tempat Pembuangan Akhir Blora dan hal tersebut belum termasuk pada kecamatan Cepu dan kecamatan lainnya(Daryanto,2021). Hal tersebut dipeparah dengan kesadaran masyarakat yang masih minim mengenai kebersihan lingkungan dan pembuangan sampah yang pada tempatnya.

Tabel 1.6

Pengelolaan sampah rumah tangga masyarakat di Kabupaten Blora.

No	Kegiatan Pengelolaan sampah	Persen (%)
1	Membakar sampah	50,4%
2	Membuang pada tempat pembuangan sementara	7,92%
3	Membuang ke sungai/ aliran air	3,75%
4	Dikubur	4,79%
5	Dibiarkan	2,5%
6	Lainnya	2,71%
7	Dibuang di lahan kosong/kebun/hutan	27,9%
8	TOTAL	100%

Sumber : jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia, 2021

Dikabupaten Blora hanya memiliki TPA di Kecamatan Blora dan Kecamatan Cepu. TPA Kecamatan Blora sendiri telah mendapatkan bantuan dari Kementerian PUPR dengan TPA yang ramah lingkungan. Sementara TPA di Kecamatan Cepu sendiri masih TPA yang biasa serta menurut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora untuk TPA kecamatan Cepu masih adanya permasalahan seperti kurangnya sarana dan fasilitas dalam pengelolaan sampah di kecamatan Cepu(DLH Kabupaten Blora, 2023). Selain itu di Kecamatan Cepu sendiri masih banyaknya ditemukan masyarakat yang membuang sampah di tempat yang tidak diperuntukan pembuangan sampah baik pada pinggir jalan maupun pada tepi sungai. Hal ini disebabkan karena petugas maupun tempat pembuangan sementara yang masih minim.

Tabel 1. 7
Timbulan Sampah Per Kecamatan tahun 2021

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Volume Timbulan			Total (%)
		Pedesaan m ³ /Hari	Perkotaan m ³ /Hari	Total m ³ /Hari	
Jati	45.773	80,68	33,75	114,43	10,47%
Randublatung	75.096	123,74	64,01	187,74	17,79%
Kradenan	39.387	38,07	60,40	98,47	11,23%
Kedungtuban	57.409	96,12	47,40	143,52	13,49%
Cepu	73.099	58,00	124,75	182,75	21,73%
Sambong	25.297	39,84	23,40	63,24	6,12%
Jiken	40.461	64,30	36,86	101,15	9,75%
Jepon	60.395	106,26	44,73	150,99	13,83%
Blora	92.778	104,97	126,98	231,95	25,36%
Tunjungan	45.918	90,48	24,32	114,80	9,83%
Banjarejo	57.904	118,54	26,22	144,76	12,08%
Ngawen	56.876	119,85	22,35	142,19	11,63%
Kunduran	62.947	124,76	32,61	157,37	13,43%
Todanan	57.767	131,86	12,56	144,42	11,10%
Bogorejo	23.882	52,19	7,52	59,71	4,75%
Japah	33.949	65,10	19,78	84,87	7,40%
Total	848.938	1.415	708	2.122	100%

Sumber : Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia 2021

Timbulan sampah di tiap kecamatan Kabupaten Blora tertulis didalam tabel diatas tersebut berdasarkan kecamatannya. Memilih daerah Kecamatan Cepu karena berdasarkan tabel diatas ini kecamatan Cepu dalam volume timbulan sampah memiliki total sebesar 21,73% nomor dua dari kecamatan Blora sebesar 25%. Memiliki kecamatan Cepu karena masih adanya permasalahan seperti kurangnya sarana dan fasilitas dalam pengelolaan sampah di kecamatan Cepu serta kecamatan Cepu sendiri memiliki tingkat timbulan sampah yang tinggi di Kabupaten Blora.

Selain itu permasalahan pada kesadaran masyarakat ini telah dijelaskan didalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah pada pasal 11 ayat 1 yaitu poin (a) didalam pengelolaan sampah daerah setiap orang wajib dalam menjaga serta memelihara kebersihan pada lingkungan sekitar dan poin (b) melakukan penanganan serta melakukan pengurangan sampah sesuai terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan tersebut. Maksud dari poin b pasal 11 ayat 1 yaitu pengurangan sampah seperti dari sumbernya ataupun memanfaatkan sampah untuk menjadi sumber daya maupun sumber energi. Penanganan sampah pada poin b tersebut seperti membuang sampah sesuai dengan tempatnya, mewadahkan sampah yang mampu memudahkan pada proses pengumpulan sampah, memindahkan sampah serta pada pengangkutan sampah, penyediaan serta pemeriharaan pada fasilitas persampahan dilingkungan sekitar.

Peneliti melakukan observasi lapangan di kecamatan Cepu didapatkan berbagai data dengan salah satunya data berupa dokumentasi beberapa sampah yang dibuang secara sembarangan oleh beberapa masyarakat yang dapat menimbulkan lingkungan menjadi tidak sehat.

Gambar 1.7

Pembuangan Sampah oleh masyarakat jalan Nglajo dan jalan Sorogo Kecamatan Cepu.



Sumber : Peneliti mengambil dokumentasi di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora.

Dalam gambar 1.7 diatas ini terlihat bahwa sampah dibuang oleh masyarakat dengan sembarangan dipinggir jalan. Sebagai bukti Gambar kiri yaitu terletak di Jalan Nglajo Kecamatan Cepu dan Gambar kanan yaitu terletak di Jalan Sorogo Kecamatan Cepu. Hal ini terjadi di beberapa lokasi di Kecamatan Cepu dengan contoh diatas. Lebih lanjut peneliti akan menyajikan sampah yang dibuang sembarangan di sungai Bengawan Solo oleh masyarakat.

Gambar 1.8

Pembuangan Sampah oleh masyarakat di tepi Sungai Begawan Solo.



Sumber : Peneliti mengambil dokumentasi di pinggir Sungai Bengawan Solo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora tahun 2023.

Dalam gambar 1.8 ini terlihat bahwa sampah dibuang oleh masyarakat di tepi sungai Begawan Solo. Sehingga hal ini menyebabkan tercemarnya air pada sungai Bengawan Solo. Berdasarkan portal berita *Radar Bojonegoro* bahwa sampah yang dibuang oleh masyarakat ini menimbulkan air sungai Bengawan Solo menjadi tercemar serta air menjadi keruh (Radar Bojonegoro, 2022).

Pada sistem dalam pengumpulan sampah di Kabupaten Blora yaitu digunakannya transportasi seperti gerobak sampah, motor Vitar (roda tiga), maupun berupa truk tempat sampah (Yudianto, 2021). Armada pada kecamatan Blora serta Kecamatan Cepu yaitu dengan menggunakannya berupa motor sampah, gerobak, *Arm Roll Truck (ARM)*, dan Dump truck. Pada kegiatan pengangkutan sampah tersebut bergantung kepada pola jaringan jalan yang dilalui serta pada jangkauan pelayanan serta batasan pada geografis yang mampu dijangkau oleh armada sampah tersebut.

Berdasarkan data yang didapat peneliti pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora, TPA sampah di kabupaten Blora terdapat dua TPA yaitu Kecamatan Blora dan Kecamatan Cepu. Untuk volume sampah Kecamatan Cepu berdasarkan data yang didapatkan yaitu :

Tabel 1.8**Jumlah Volume sampah di Kecamatan Cepu dari Tahun 2020 hingga 2022.**

No	Tahun	Daerah	Jumlah
1	2020	Kecamatan Cepu	12.042,02 Ton
2	2021	Kecamatan Cepu	12.058,42 Ton
3	2022	Kecamatan Cepu	12.067,25 Ton
4	TOTAL		36.167,69 Ton

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora Tahun 2023

Berdasarkan data diatas ini didapatkan bahwa sampah di kecamatan Cepu mengalami naik turun tiap tahunnya bila berdasarkan tahun 2020 hingga pada tahun 2022 ini. Sehingga total dari tahun 2020 hingga tahun 2022 yaitu sebesar 36.167,69 Ton. Pada pengelolaan sampahnya di Kecamatan Cepu terdapat personelnnya yaitu

Tabel 1.9**Jumlah Petugas Kebersihan dan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Cepu tahun 2023.**

No	Bidang	Daerah	Jumlah
1	Subkooor Kebersihan	Kecamatan Cepu	32
2	Subkooor Pengelolaan Sampah	Kecamatan Cepu	7
3	Subkooor PB3LB3	Kecamatan Cepu	1
4	TOTAL		40

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora tahun 2023

Berdasarkan tabel 7 tersebut didapatkan sebuah data bahwa dibawah bidang KPSPB3LB3 yaitu terdapat tiga sub bagian dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Blora dan termasuk pada Kecamatan Cepu. Tabel diatas menampilkan mengenai Jumlah petugas di Kecamatan Cepu yaitu berdasarkan subkooor Kebersihan berjumlah 32, pengelolaan sampah berjumlah 7 dan PB3LB3 yaitu berjumlah 1. Sehingga total petugas yaitu sebanyak 40 personel. Dalam pengelolaan Sampah ini juga terdapat fasilitas berupa transportasi yang disediakan untuk menunjang berjalannya pengelolaan sampah di Kabupaten Blora dan Kecamatan Cepu.

Tabel 1.10
Jumlah Kendaraan pengangkut sampah di Kabupaten Blora Tahun 2023.

No	Daerah	Tipe Kendaraan	Jumlah
1	Kabupaten Blora	Viar Roda 3	8
		Dam Truk	3
		Arm Rol	7
2	Tempat Pembuangan Akhir Kabupaten Blora	Dam truk	1
		Viar Roda 3	3
		Eksafator	2
		Bulldoser	2
3	Kabupaten Blora	Mobil box untuk sampah limbah beracun	1
4	TOTAL		27

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora Tahun 2023

Tabel 1.11
Jumlah Kendaraan pengangkut sampah di Kecamatan Cepu Tahun 2023.

No	Daerah	Tipe Kendaraan	Jumlah
1	Kecamatan Cepu pada Bidang Kebersihan	Viar Roda 3	2
		Dam truk	1
		Arm Roll	2
2	Tempat Pembuangan Akhir Kecamatan Cepu	Viar roda 3	1
3		Bulldoser	1
4	TOTAL		7

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas ini didapatkan bahwa kabupaten Blora memiliki beberapa kendaraan fasilitas dengan total sebanyak 27 kendaraan dan Kecamatan Cepu memiliki jumlah total sebanyak 7 kendaraan untuk pengelolaan sampah dan pengangkut sampah baik di perkotaan serta untuk mengangkut sampah di setiap rumah tangganya. Berdasarkan data tabel diatas ini bersumber dari narasumber Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora

yang dilakukan sebelum penelitian terbilang belum mencukupi untuk mengatasi persampahan dari timbulan sampah di Kecamatan Cepu dengan segi jumlah. Namun dengan fasilitas ini masih kurangnya serta meratanya dalam pengelolaan sampah di setiap daerahnya karena untuk kabupaten Blora sendiri masih memiliki dua TPA yaitu Kecamatan Blora serta Kecamatan Cepu sehingga beberapa daerah tidak terjangkau untuk pengambilan sampah serta pengelolaan sampahnya.

Alasan peneliti mengambil daerah Kecamatan Cepu karena Kabupaten Blora merupakan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang hanya memiliki dua Tempat Pembuangan Akhir sampah yaitu di Kecamatan Blora dan Kecamatan Cepu(Bloranews.com). Mengambil Kecamatan Cepu berdasarkan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora memaparkan bahwa Kecamatan Cepu masih banyaknya permasalahan pada pengelolaan sampah seperti belum adanya jembatan ukur untuk mengukur jumlah volume sampah di TPA Kecamatan Cepu, Belum sebandingnya pada sarana dan prasarana yang tersedia, belum adanya Sanitary Landfill serta masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah secara mandiri(DLH Kabupaten Blora, 2023). Hal ini yang menjadi alasan dari peneliti untuk mengambil daerah di Kecamatan Cepu. Sesuai pemaparan tersebut, muncul pertanyaan, ”mengapa masih ditemukannya sampah yang dibuang sembarangan di kecamatan Cepu?” atas dasar pertanyaan tersebut peneliti memiliki ketertarikan menggunakan judul **”Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Kecamatan Cepu Kabupaten Blora”**

1.2. Identifikasi Masalah :

Berdasarkan latar belakang, maka didapatkan sebuah identifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah.
2. Jumlah timbulan sampah yang tinggi
3. Belum sebandingnya cakupan didalam pengelolaan persampahan dengan sarana prasarana yang tersedia.

1.3. Rumusan Masalah :

Berdasarkan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan sebuah permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora?
2. Apa saja faktor pendukung serta penghambat didalam pengelolaan sampah di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora?

1.4. Tujuan Penelitian :

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan serta menganalisis mengenai bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada daerah Kecamatan Cepu Kabupaten Blora.
2. Menganalisis faktor penghambat serta pendukung dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora.

1.5. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai bagi berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Pada manfaat Teoritis ini diharapkan dari penelitian dapat memberikan sebuah kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam mengenai kebijakan publik, serta dapat memberikan sumbangan dari pemikiran serta tambahan wawasan bagi penelitian lainnya yang melakukan penelitian serupa.

2. Manfaat Praktis

Peneliti mampu mengetahui mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kecamatan Cepu Kabupaten Blora serta mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi dari implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan untuk pihak institusi pemerintah Indonesia serta daerah yang sedang mengembangkan kebijakan pengelolaan sampah.

1.6. Kerangka Teori

1.6.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan judul *Pengelolaan Sampah Desa Gudang Tengah Melalui Manajemen Bank Sampah* yang dilakukan oleh Dewi Ariefahnoor, Nurul Hasanah dan Adhi Suya jenis metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Pada pengelolaan sampah dengan menggunakan sistem bank sampah mampu membantu bagi pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah didalam menangani sampah serta mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu bank sampah turut juga mampu memberikan kesadaran bagi masyarakat mengenai lingkungan yang rapi, bersih serta sehat. Selain bank sampah mampu membantu menjaga lingkungan, bank sampah juga mampu memberikan masyarakat berupa tabungan keuangan serta imbalan lainnya berupa sembako.

Penelitian yang dilakukan oleh Lusiani Ferelia Halim, Didik Budi Fariadi berjudul *Pengelolaan Sampah Melalui Inovasi Daur Ulang pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu "Mulyoagung Bersatu" Kabupaten Malang* jenis metode penelitian yang digunakan didalam jurnal ini yaitu penelitian kualitatif dengan cara wawancara kepada narasumber yang terlibat didalam pengelolaan sampah. Pada penelitian ini menggambarkan bahwa dalam proses inovasi Pengelolaan Sampah Terpadu di Mulyoagung Bersatu memberikan sebuah hasil mengenai inovasi daur ulang sampah yang dikelola oleh manajemen yang memiliki kemampuan dengan membuktikan bahwa inovasi daur ulang sampah mampu mengurangi residu sampah dengan yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir hingga 88%.

Penelitian berjudul *Pengelolaan Sampah di Kota Bertipe Sedang: Studi Kasus di Kota Cirebon dan Kota Surakarta* yang dilakukan oleh Rohani Budi Prihatin jenis metode penelitian yang digunakan didalam jurnal ini yaitu penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya dengan cara wawancara pada *stakeholders* yaitu Dinas Lingkungan Hidup serta pelaku bisnis bank sampah. Kota Cirebon serta kota Surakarta ini masuk kedalam kategori kota sedang, pada penelitian ini ditemukan bahwa pada pengelolaan sampah di kedua kota tersebut masih menerapkannya sebuah pola 3P yaitu Pengumpulan, pengangkutan serta Pembuangan. Sehingga pola tersebut menunjukkan pengelolaan sampah tersebut

dikumpulkan dengan sebanyak – banyaknya lalu diangkut dengan secepatnya serta sampah tersebut dibuang sejauh mungkin dari masyarakat. Namun pada pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir masih berbentuk sistem *open dumping* ataupun sampah yang dikumpulkan maupun ditumpuk pada tempat terbuka tanpa menggunakan pengelolaan khusus.

Penelitian yang dilakukan oleh Rianto Nurcahyo, Indra Adiputra dan Febriani Pangestu dengan berjudul *Inovasi Alarm dan Kedisiplinan Masyarakat dalam Manajemen Pembuangan Sampah Rumah Tangga di Perkotaan*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif. Penelitian ini memiliki tujuan untuk dapat membuat platform yang mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat mengenai pengelolaan jadwal pembuangan sampah sehingga sampah tersebut tidak menumpuk secara berlebihan maupun tidak memberikan dampak seperti membuang sampah dengan yang tidak benar. Pada penelitian ini menghasilkan bahwa inovasi tersebut disimpulkan masyarakat membutuhkan berupa dukungan maupun berupa fasilitas mengenai permasalahan sampah selain itu komunitas kebersihan maupun komunitas tentang pengelolaan sampah dibutuhkan untuk dapat mendisiplinkan masyarakat mengenai permasalahan sampah. Pada penelitian ini juga masih didapat kurangnya perhatian dari pemerintah daerah mengenai tindak lanjut dari permasalahan sampah.

Penelitian berjudul *Sosialisasi Pembuatan bank sampah dan pengelolaan sampah organik serta anorganik* peneliti oleh Nurul Hikmah dan Helena Losa Ruing. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan sosialisasi mengenai pembuatan bank sampah serta memberikan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah organik dan sampah anorganik untuk mampu menghaslkan perekonomian khususnya bagi remaja di daerah Kelurahan Air Putih Perumahan Graha Indah Samarinda. Hal tersebut disebabkan oleh kalangan remaja kemampuannya hanya bisa untuk mengandalkan petugas kebersihan untuk dapat mengambil persampahan dengan petugas kebersihan yang armadanya juga hanya terbatas dalam ukuran muatannya. Selain itu remaja juga masih belum bisa dalam mengolah sampah maupun barang bekas untuk digunakan kembali yang mampu memberikan penghasilan bagi perekonomian dan belum adanya bank sampah yang mengelola sampah organik serta anorganik. Penelitian ini menghasilkan peningkatan wawasan

serta peningkatan pemahaman bagi remaja mengenai pengelolaan sampah organik dan anorganik.

Penelitian berjudul *Manajemen Pengelolaan Sampah Bantargebang di Kota Bekasi* peneliti oleh Parluhutan Salomo, Joyce Rares dan Very Londa. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pada penelitian ini menghasilkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta telah mengolah sampah untuk dapat diproses dengan memberikan manfaat serta tidak memberikan dampak negatif dan dampak yang berbahaya kepada masyarakat dan lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta ini juga memberikan berupa fasilitas kepada pekerja serta pegawainya berupa penghargaan, sertifikat serta alat pelindung diri untuk pengelolaan sampahnya. Dalam pengelolaan sampahnya dilakukannya manajemen seperti menurut ahli yaitu George Terry (Sukarna, 2011) yaitu :

- a. Perencanaan (*Planning*)
- b. Pengorganisasian (*Organizing*)
- c. Penggerakan (*Actuating*)
- d. Pengawasan (*Controlling*)

Penelitian berjudul *Manajemen Pengelolaan Sampah Studi Kasus di Bank Sampah Tirtarona Tlogomas Kota Malang* peneliti oleh Yulianti dan Rofi'ul Huda, penelitian ini untuk bertujuan untuk memberikan manfaat atas pengelolaan Bank Sampah Masyarakat untuk dapat mengoptimalkan pada produktifitas guna menciptakan kenyamanan serta ketentraman pada kehidupan masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk pembenahan mengenai manajemen pengelolaan sampah, pengembangan sarana dan prasarana serta perbaikan sarana prasarana serta pembinaan kepada sumber daya manusia dan pembinaan kepada pengurus sampahnya.

Penelitian karya dari Danang Aji Kurniawan dan Ahmad Zaenal Santoso pada jurnal *Pengelolaan Sampah di Daerah Sepatan Kabupaten Tangerang*. Penelitian ini memiliki tujuan untuk dapat mengimplimentasikan kebijakan pengelolaan sampah pada daerah Sepatan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang. Penelitian ini dilakukan dengan cara tahap persiapan hingga pada tahap pelaksanaannya. Terdapat permasalahan dalam implementasi kebijakan pada pengelolaan sampah ini yaitu tidak memiliki peraturan daerah tentang mengatur

pengelolaan sampah sehingga tidak ada pemilahan sampah yang diangkut. Selain itu tidak adanya sumber daya manusia yang dipekerjakan oleh dinas dalam bentuk pemilahan sampah pada lokasi Tempat Pembuangan Akhir serta kurangnya partisipasi dari masyarakat serta komunitas kreatif didalam menyelesaikan sebuah proses pengelolaan 3R.

Penelitian luar negeri yaitu dari peneliti Kenichi Shimamoto berjudul “*Determining Factors Of Waste Management In Japan*” pada penelitian ini Jepang volume limbah di negara Jepang menjadi perhatian utama bagi pemerintahnya serta masyarakat negara Jepang juga meningkatkan minat didalam pengelolaan serta daur ulang limbahnya. Penelitian tersebut mengkaji mengenai faktor yang dapat mempengaruhi limbah padat kota. Penelitian tersebut didapatkan bahwa persentase penduduk wanita lebih tinggi memiliki sampah kota per kapita dengan nilai yang lebih rendah dan pada tingkat daur ulang memiliki nilai yang lebih tinggi, temuan keduanya yaitu daerah yang memiliki populasi lanjut usia memiliki limbah padat kota yang lebih rendah. Sementara ditemukan hasil lain bahwa produk domestik bruto lebih tinggi serta tingkat pendidikan yang lebih tinggi dapat menghasilkan limbah kota yang lebih besar serta tingkat daur ulang yang lebih rendah pada tingkatan yang signifikan.

Penelitian lainnya berjudul “*Wasted! Resource Recovery and Waste Management In Cuba*” penulis dari Michael Ablheim, Maïke Becker, Heike Trastl, dan Yeniley Allegue Losada. Penelitian tersebut mengenai pengumpulan limbah padat serta pada pemulihan yang didaur ulang dari limbah merupakan sebuah permasalahan dan tantangan besar yang dihadapi oleh negara Cuba selama bertahun – tahun. Penelitian survey kecil yang dilakukan di kota Havana ditemukan bahwa mata metode pengumpulan sampah ditemukan tidak efisien dan tidak dapat diandalkan selain itu pada daur ulang limbah serta pemulihan sumber daya yang tidak memadai pada negara Cuba. Terdapat penyebab utama dalam masalah pengelolaan sampah ini yaitu kurangnya pada kerjasama dari semua pihak yaitu *stakeholder* yang memiliki kepentingan dalam pengelolaan sampah seperti rumah tangga, perusahaan swasta dan perusahaan publik mengenai mengumpulkan sampah dan pengelolaan sampah.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah ditulis diatas maka terdapat beberapa manfaat dari penelitian terdahulu yang mampu diterapkan didalam penelitian ini.

Manfaat dari penelitian terdahulu tersebut yang memiliki keterkaitan didalam menganalisis penelitian yaitu implementasi kebijakan publik mengenai pengelolaan sampah daerah, faktor penghambat dan faktor pendorong mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah, kerjasama antara masnayraakt dengan pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada pelayanan kebersihan lingkungan, dan penggunaan ide inovasi didalam meningkatkan upaya pengelolaan sampah.

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan penelitian menggunakan rujukan dari penelitian terdahulu. Pada penelitian ini berfokus kepada implementasi kebijakan mengenai pengelolaan sampah di suatu daerah. Pada peneltian ini akan meneliti mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah serta pada faktor penghambat dan faktor pendorong dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampat dengan menjelaskan serta mendalami sesuai terhadap fakta lapangan penelitian. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah menjadi rujukan terdapat beberapa kendala serta beberapa keberhasilan didalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah sehingga hal tersebut memberikan keterkaitan untuk dilakukannya penelitian ini.

1.6.2. Administrasi Publik

Menurut Indradi(2016:1) dalam bukunya yang berjudul “*Dasar – dasar dan Teori Administrasi Publik*” menyatakan bahwa Administras yang dikenal di Indonesia merupakan kata yang berasalkan dari Bahasa latin yaitu *administrare* yang artinya yaitu “*Memberikan pelayanan kepada*”. Indradi(2016:1) juga menyatakan bahwa administrasi memiliki arti yang lain yaitu mengelola (*Manage*) dan menggerakkan (*to direct*). Sehingga administrasi memiliki arti sebagai mengelola sesuatu maupun menggerakkan sesuatu.

Pengertian lainnya juga dikemukakan oleh Indradi (2016:1) dalam bukunya yang berjudul “*Dasar – dasar dan Teori Administrasi Publik*” yaitu kata administrasi berasal dari Belanda yaitu tata usaha, manajemen organisasi, serta manajemen sumber daya. Sehingga dari kata Belanda tersebut mencakup dari kegiatan mengenai Tata usaha serta pada manajemen.

Administrasi dalam arti sempit Indradi(2016:2) dalam bukunya yang berjudul “*Dasar – dasar dan Teori Administrasi Publik*” menyatakan bahwa administrasi publik merupakan kegiatan dalam tata usaha maupun cata mencatat dari jaman Blanda.

Pengertian ini juga di lanjutkan oleh beberapa teori lainnya, menurut J.Wajong(1992) dalam buku yang berjudul “*Dasar – dasar dan Teori Administrasi Publik*” menyatakan bahwa administrasi didalam kegiatannya meliputi dari pekerjaan tata usaha dengan kegiatan seperti mencatat mengalai segala yang terjadi didalam organisasi dengan tujuan untuk menjadi sebuah bahan pencatatan keterangan yang ditujukan kepada pemimpin dari sebuah organisasi.

Menurut A.J.A. Prange(dalam Westra,2002) didalam bukunya yang berjudul “*Dasar – dasar dan Teori Administrasi Publik*” menyatakan bahwa administrasi merupakan bentuk dari pencatatan maupun bahan yang dibutuhkan didalam pelaksanaan untuk keperluan pimpinan didalam organisasi bagi pimpinan yang tepat.

Menurut J.S. Tjeng Bing Tie(1965) dalam (Westra,2002) menyatakan bahwa administrasi memiliki tujuan serta fungsi untuk mencatat mengenai bahan yang diperlukan untuk kebutuhan dari pemimpin norngaisasi sehingga pada pencatatan mengenai bahan tersebut diharuskan memiliki kerapian dan dapat memberikan keterangan dengan benar dan jelas. Sehingga administrasi disini dalam arti sempit dapat diartikan sebagai kegiatan Tata usaha.

Indradi(2016:6) dalam bukunya yang berjudul “*Dasar – dasar dan Teori Administrasi Publik*” menyebutkan bahwa administrasi juga merupakan sebagai ilmu. Administrasi bisa dipandang ilmu har tersebut disebabkan memiliki sebuah *subject matter* yang terorganisir dengan rapi serta baik serta telah diuji didalam praktiknya yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Sehingga Indradi (2016:7) menyatakan bahwa administrasi dapat dikelompokkan didalam ilmu social sebagai dari ilmu terapan maka administrasi dapa menjadi ilmu yang mampu dipelajari serta diajarkan dengan terus berkembang.

Indradi(2016:7) menyebutkan bahwa administrasi sebagai manajemen. Pengertian yang dikemukakan oleh Indradi didalam buku “*Dasar – dasar dan Teori*

Administrasi Publik” juga memiliki pengertian yang serupa oleh pengertian dari ilmuwan lainnya yaitu yang dikemukakan oleh *William J. Schultz* (dalam Westra 2002) menyatakan bahwa didalam kata *administrasi* dan *management* memiliki pengertian yang serupa sehingga kata tersebut mampu memberikan makna yang serupa.

Menurut *Henry Fayol* dalam buku *General and Industrial Manahement* bahwa pengeritan mengenai kata dari administrasi serta manajemen mampu digunakan dengan pengertian yang memiliki makna yang sama.

Namun Administrasi memiliki pandangan lain sebagai administrasi pemerintahan. *Indradi*(2016:10) dalam bukunya yang berjudul “*Dasar – dasar dan Teori Administrasi Publik*” mengemukakan bahwa terdapat pengaruh dari Tata Hukum negara Belanda yang memiliki istilah bahwa administrasi negara ataupun pemerintah.

Hal tersebut didorong oleh beberapa pengertian dari teori lainnya yaitu *Wijaya* (dalam Westra,2002) dalam bukunya yang berjudul “*Dasar – dasar dan Teori Administrasi Publik*” mengemukakan bahwa administrasi merupakan sebuah rangkaian dari organ negara rendah maupun tinggi dengan memiliki tugas menjalankan sebuah pemerintahan pelaksanaan serta kepolisian.

Pengertian lainnya menurut *Prajudi Atmosudirdjo* (dalam *Indradi*,2016) dalam buku yang berjudul “*Dasar – dasar dan Teori Administrasi Publik*” merumuskan bahwa administrasi negara merupakan aparatur negara dengan dipimpin serta dijalankan oleh pemeierntah dengan tujuaan untuk dapat menyelenggarakan dari undang – undang, kebijakan serta kehendak dari pemerintahan itu sendiri.

Administrasi Publik adalah sebuah ilmu social dengan cara mengkaji pada sistem pengelolaan negara dengan cara mengaiktkan kepada organisasi, kebijakan, pelayanan publik serta pada manajemennya. Ilmu administrasi publik sendiri merupakan ilmu pengetahuan dengan memiliki sifat yang dinamis serta dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu dengan menyesuaikan terhadap tantangan yang dihadapinya.

Administrasi publik memiliki beberapa definisi menurut para ahli yang berbeda beda, pada buku "*Enam dimensi strategi administasi publik*". Menurut *Dimock* dan *fox* ilmu administrasi adalah produksi barang maupun jasa yang telah direncanakan untuk dapat memberikan pelayanan untuk kebutuhan masyarakat. Dari definisi menurut *Dimock* dan *fox* ini bahwa administrasi publik merupakan kegiatan perekonomian atau dengan bisnis tetapi dapat secara khusus didalam menghasilkan barang maupun pada pelayanan publiknya.

Pengertian lainnya Administrasi Publik menurut *Chandler* dan *Plano* dalam buku "*Enam dimensi strategi administasi publik*" yaitu administrasi publik merupakan sebuah sumberdaya serta *personal publik* yang dioorganisirkan untuk dapat memformulasi, implementasi serta dapat mengelola (*manage*) sebuah keputusan didalam kebijakan publik. *Keban*(2014) mengemukakan bahwa kedua ahli tersebut juga mengartikan bahwa Administrasi publik ini memiliki tujuan untuk dapat menyelesaikan sebuah permasalahan publik dengan perbaikan maupun penyempurnaan pada bidang organisasi maupun keuangan dan sumber daya manusia(*Keban*,2014).

Menurut *Barton* dan *Chappel* (dalam buku "*Enam dimensi strategi administasi publik*") berpendapat bahwa administrasi publik yaitu sebagai *the work of government* ataupun sebuah pekerjaan yang dilakukan pemerintahan. Menurut *Barton* dan *Chappel* dalam definisi tersebut yaitu ditekankan kepada keterlibatan personal didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut ahli lainnya yaitu *Starling* (dalam buku "*Enam dimensi strategi administasi publik*" karya *Keban*,2014) yaitu administrasi publik merupakan semua hal yang dicapai oleh pemerintah ataupun dilakkan dengan sesuai yang telah dijanjikan diwaktu kampanye pemilihan. Sehingga ditekankan kepada aspek *the accomplishing side of government* serta seleksi pada kebijakan publik(*Stillman* II,1991).

Administrasi publik menurut *Nigro & Nigro* (dalam buku "*Enam dimensi strategi administasi publik*") menjealaskan bahwa administrasi publik merupakan usaha kerjasama oleh kelompok didalam sebuah lingkungan publik dengan mencakup tiga cabang yaitu legislative, eksekutif dan yudikatif. Sehingga memiliki peranan yang penting didalam menformulasikan kebijakan publik dan menjadi

bagian didalam proses politik yang memiliki perbedaan cara yang ditempuh oleh administrasi swasta didalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat(Keban,2014).

Menurut ahli lainnya yaitu *Rosenbloom*(dalam buku "*Enam dimensi strategi administrasi publik*") (Keban,2014) yaitu administrasi publik sebagai dari teori serta prosesn dari manajemen, politik maupun hokum untuk dapat menjalankan tugas pemerintah pada bidang eksekutif, legislative dan yudikatif didalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat dengan menyeluruh.

Menurut *Nicholas Henry* (dalam buku "*Enam dimensi strategi administrasi publik*") juga mengemukakan bahwa administrasi publik meruapkan kombinasi dari teori dan praktek dengan tujuan untuk dapat memprmosikan mengenai pemahanan tentang peran dari pemerintah didalam hubungannya dengan masyarakat serta mendorong pada kebijakan publik sehingga lebih responsive terhadap pada kebutuhan social. Administrasi publik sendiri juga memiliki kesesuaian terhadap efektivitas, efisiensi serta pemenuhan pada kebutuhan masyarakat.

Pengertian lainnya yaitu *McCurdy*(1986) dalam Keban(2014) mengemukakan bahwa administrasi publik dilihat sebagai sebuah proses politik dengan metode memerintah pada suatu negara untuk dapat melakukan berbagai fungsi negara bagi pada persoalan manajerial dan persoalan pada politik. Menurut *Hughes*(1994) dalam Keban(2014) adminisrasi publik adalah sebuah aktivitas yang melayani publik maupun aktivitas pada pelayanan publik didalam menjalankan kebijakan publik yang diperoleh dari pihak lain.

Menurut *Pasolong*(2007) didalam bukunya berjudul "*Teori Administrasi Publik*" administrasi publik merupakan bentuk dari kerjasama oleh sekelompok ataupun lembaga didalam menjalankan tugas pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan publik dengan efisen serta efektif.

Administrasi publik atau administrasi negara memiliki beberapa ciri didalamnya, dalam buku "*Ilmu administrasi Negara*" karya (*Thoha*,2003) menurut ahli yaitu *Gerald E Caiden* menjelaskan ciri administrasi negara yaitu :

- a. Administrasi negara tidak mampu untuk dihindari, hal ini dikarenakan masyarakat negara akan selalu terhubung oleh administrasi negara.

- b. Administrasi negara harus dipatuhi, hal tersebut disebabkan administrasi negara memiliki sifat yang memonopoli dan memaksa untuk menggunakan wewenang serta kekuasaannya. Bila dari masyarakat negara tidak mematuhi mengenai peraturan dari administrasi negara, maka administrasi negara akan melakukan pemaksaan kepada masyarakat negaranya.
- c. Administrasi negara mempunyai sebuah prioritas, hal tersebut prioritas yang dimiliki administrasi negara berfokus kepada prioritas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat negaranya.
- d. Administrasi negara memiliki ukuran yang tidak ada batasnya, dalam hal ini administrasi negara memiliki ukuran yang meliputi dari darat, udara hingga pada laut dalam mengatur negaranya.
- e. Pemimpin pada administrasi negara memiliki sifat yang politis. Dalam hal ini pejabat politik harus memiliki sifat yang politis seperti pimpinan politik yaitu presiden, wakil presiden, gubernur, hingga pada bupati.
- f. Administrasi negara didalam pelaksanaannya tidak dapat diukur. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya meliputi seluruhnya dari perdamaian hingga pada kemerdekaan, pendidikan sehingga cakupan tersebut sangat luas.
- g. Harapan yang tidak sedikit kepada administrasi negara. Hal tersebut disebabkan administrasi negara ini menurut masyarakat dapat memberikan kebutuhan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat, namun dilain sisi administrasi negara juga meliputi pada anggaran, keahlian serta sumber daya lainnya.

Administrasi publik memiliki peran didalam negara, peran administrasi publik ini seperti yang kemukakan oleh *Karl Polanyi* didalam buku berjudul "*Teori Administrasi Publik*" karya Pasolong(2017) menjelaskan bahwa pada skondisi perekonomian sebuah negara tergantung pada administrasi publik.

Pengertian lainnya yang dikemukakan oleh *Frederik A. Cleveland* didalam buku Pasolong(2017) juga mengemukakan bahwa administrasi publik memiliki peran yang sangat penting didalam membantu pada pemberdayaan masyarakat serta dalam menciptakan demokrasi disuatu negara. Sehingga administrasi publik memberikan sebuah manfaat untuk memberikannya pelayanan publik kepada masyarakat dengan pemerintah memberikan profesionalisme serta menerapkan efektif dan efisiensinya.

Teori lain dikemukakan oleh *Gerald E Caiden* didalam buku administrasi publik karya (Darmadi dan Sukidin,2009) mengemukakan bahwa terdapat kekhususan didalam administrasi publik yaitu :

a. Administrasi Negara tidak dapat dihindari

Hal tersebut mengartikan bahwa administrasi publik dalam eksistensi melekat pada eksistensi sebuah negara. Maka peran administrasi publik tersebut memiliki hal yang penting untuk kepentingan masyarakat negara. Sehingga aparatur yang bekerja dalam administrasi negara diharuskan untuk menyelesaikan pekerjaan tugas yang memiliki hubungan pada pelayanan masyarakat.

b. Administrasi harus patuh

Administrasi Publik bila dibandingkan oleh organisasi lainnya, administrasi memiliki sifat sifat yang monopoli pada kekuasaan yang bersifat memaksa. Organisasi lain bila dalam menegakkan sebuah legalitas tersebut dengan berpedoman kepada administrasi publik. Sebagai contoh dalam buku administrasi publik (dalam Darmadi dan Sukidin, 2009) yaitu seperti organisasi kepolisian, penjara serta pada lembaga peradilan.

c. Administarsi Publik memiliki prioritas

Administrasi publik memiliki prirotas seperti halnya didalam pelayanan masyarkat dengan dimulai dari strategi sebuah pembangunan, hingga pada implementasi. Sehingga dalam hal ini administrasi publik harus memiliki prioritas terlebih dahulu dalam pengerjaannya.

d. Administrasi publik memiliki sebuah pengecualian

Didalam keberjalannya administrasi publik perlunya sebuah control didalamnya untuk mampu berjalan dengan efektif serta efisien.

e. Manajemen puncak pada administrasi publik yaitu politik

Didialam pandangan sebuah politik administrasi publik adalah bagian dari sebuah kinerja maupun totalitas dari pemerintah didalam menjalankan sebuah politiknya.

f. Penampilan pada administrasi publik.

Pada tingkat sebuah pelayanan di kepuasan maupun ketepatan didalam berjalannya administrasi publik memiliki sifat yang subyektif yang bergantung kepada kepentingan masing – masing.

- g. Banyaknya sebuah harapan yang ditujukan kepada administrasi publik Masyarakat menaruh sebuah harapannya kepada administrasi publik, karena pejabat publik dilihat sebagai orang yang bekerja untuk masyarakat maupun untuk publik.

Administrasi publik memiliki ruang lingkup didalamnya. Berdasarkan buku "*Teori Administrasi Publik*" Karya Pasolong(2017) menurut ahli yaitu Nicholas Henry(1995) menyatakan bahwa ruang lingkup pada administrasi publik mampu dilihat berdasarkan topik yang dibahas didalam ilmu administrasi publik tersebut. Hal tersebut seperti pada :

- a. Organisasi Publik,

Pada organisasi publik ini berhuubngan terhadap model dari organisasi serta pada perilaku organisasi tersebut.

- b. Manajemen Publik

Manajemen publik sendiri memiliki hubungan terhadap pada sistem serta pada ilmu manajemen dengan evaluasi pada program serta pada produktivitas selain itu berhubungan ula terhadap anggaran serta pada manajemen di sumber dayanya.

- c. Imlementasi

Pada implmenetasi memiliki hubungan terhadap pendekatan mengenai administrasi terhadap pemerintah serta terhadap etika birokrasinya.

Santosa(2008) mengemukakan didalam bukunya yang berjudul "*Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*" Didalam pembangunan negara, sistem administrasi publi merupakan hal yang sangat penting didalam menggerakkan didalam pembangunan negara. Hal tersebut didorng juga oleh pendapat ahli lainnya yaitu Dainel Lerner didalam buku yang berjudul "*Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*" bahwa pada sistem administrasi publik telah memicu esebuah porses didalam perubahan pada komunikasi, ekonomi, politik, budaya serta demografi.

Namun administrasi publik memiliki sebuah permasalahan didalam implementasinya, berdasarkan buku karya Ibrahim(2009) berjudul "*Administrasi Publik & implementasinya*" diantaranya seperti tuntutan di negara Indonesia untuk mampu meningkatkan sebuah kualitas pada demokrasi negara dengan menjadi

sebagai sistem serta menjadi sebuah budaya sehingga tidak hanya sebagai peristiwa namun negara mampu menyelesaikan masalah pada penyelenggaraan negara serta pada masalah globalisasi dengan ciri dari masyarakat yang terbuka.

Selain itu berperannya dari pemerintah daerah terhadap tuntutan dari masyarakat mengenai kebijakan nasional serta respn terhadap masalah global. Dengan adanya otonomi daerah tersebut diharapkan mampu untuk menjadi wadah serta mengoptimlkan kepada keragaman setiap daerahnya dan memmiliki kontak kepada warga yang lebih dekat dan *intens*.

Dalam buku Utomo(2018) dengan berjudul "*Administrasi publik baru Indonesia*" menjelaskan bahwa dalam era globalisasi sekarang ini serta pada era perdagangan bebas internasional profesionalistem didalam sistem adaministrasi publik perlunya ada perubahan. Sistem administrasi publik yang beradap pada COP (*Control, Order dan Prediction*) perlunya merubah kepada menjadi lembaga yang intelektual seperti kepada ACE (*Alignment, Creativity and Empowerment*)(Utomo,2018).

Hal tersebut didukung oleh pernyataan ahli didalam buku "*Administrasi publik baru Indonesia*" bahwa perlunya penyesuaian serta peninjauan ulang pada peran serta kedudukan pada sistem administrasi negara didalam menghadapi perubahan globalisasi. Sehingga Administrasi public merupakan mengelola atau *manage* maupun menggerakkan sesuatu untuk pelayanan kepada publik atau masyarakat untuk mengatasi permasalahan publik.

1.6.3. Kebijakan Publik

Kebijakan publik memiliki kata lain yaitu *Publik Policy*, pada kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) kebijakan merupakan rangkaian dari konsep serta asas yang menjadi sebuah dasar dalam rencana pada pelaksanaan program pemerintahan. Kebijakan Publik adalah hal yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan oleh pemerintahan didalam menyelesaikan sebuah permasalahan publik ditengah masyarakat(Nugroho.Y,2021). Menurut ahli yaitu *Woll* sebagaimana yang telah dikutip oleh Tangkilisan (2003:2) bahwa kebijakan publik merupakan aktivitas pemerintah didalam menyelesaikan permasalahan ditengah masyarakat baik dengan cara langsung maupun dengan melalui berbagai lembagayang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Anderson *didalam Hil & Hupe, (2002)* menjelaskan

kebijakan publik merupakan serangkaian dari tindakan aktor dengan berkaitan terhadap permasalahan yang dihadapi.

Menurut Chandier dan Piano(Dalam Wijoyo.H, 2021) Kebijakan publik merupakan pemanfaatan pada strategi kepada sumber daya yang mampu digunakan untuk tujuan menyelesaikan permasalahan dan pemerintahan. Menurut Heinz Eulau dan Kenneth(Dalam Wijoyo.H, 2021) kebijakan publik merupakan sebuah ketetapan yang dapat dilakukan dengan memiliki perilaku dan tindakan yang berulang baik dari pembuat kebijakan ataupun dari sasaran kebijakan publik tersebut. Sementara menurut Anderson(Dalam Wijoyo.H, 2021) kebijakan publik merupakan sebuah kebijakan yang dibuat oleh pejabat pemerintah maupun badan pemerintahan yang pelaksana maupun kebijakannya memiliki tujuan, meliputi pada tindakan pemerintahan dan kebijakan terserbut memiliki sifat yang positif dan berdasarkan kepada aturan didalam undang – undang yang memiliki sifat memaksa dan mengikat.

Menurut *Robert Eyestone* (1971:18) (Dalam Wijoyo.H, 2021) menjelaskan kebijakan publik merupakan hubungan pada suatu pemerintahan dengan lingkungannya. Maksudnya adalah dapat sebuah hubungan pemerintahan dengan masyarakat maupun sebagai lingkungan sumber dayanya. Sementara menurut *Thomas R.Dye* (1955:1) mengemukakan bahwa Kebijakan publik merupakan hal yang dipilih oleh pemerintah untuk dapat melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu sebagaimana didalam kalimatnya yaitu “*Publik Policy iswhatever government choose to do or not*”(Mustari.N,2015).

Sementara menurut *Carl Friedrich*(dalam Mustari.N,2015) bahwa kebijakan publik adalah sebuah arah dari tindakan yang diformulasikan maupun diusulkan oleh perorangan, kelompok maupun pemerintahan didalam lingkungan tertentu untuk mengatasi sebuah tujuan maupun merealisasikan sebuah sasaran. Menurut *Jonnes* (1997) dalam Mustari.N(2015) kebijakan publik merupakan kegiatan dari pemerintahan yang dapat merubah pada lingkungannya sedikit demi sedikit. Dan menurut *Easton* (1969) dalam Mustari.N(2015) menjelaskan bahwa kebijakan publik dapat diartikan sebagai dari pengalokasi dari nilai kekuasaan untuk masyarakat dengan keberadaan yang mengikat. Sehingga kebijakan publik dapat disimpulkan bahwa sebuah serangkaian dari keputusan pemerintahan yang diambil oleh sekelompok maupun perseorangan didalam mewujudkan sebuah tujuan tertentu pada lingkungan masyarakat.

Thomas R. Dye dalam buku (Santosa2017) berjudul ”*Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*” merumuskan bahwa kebijakan publik merupakan sebuah pilihan dari pemerintah dalam bertindak maupun dalam tidak berindak. Sementara ahli lain dalam mengartikan kebijakan publik yaitu dari *David Easton* (dalam Santosa,2017) mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan sebuah pengalokasian dari nilai untuk seluruh masyarakat engan keseluruhan. Pengertian dari Easton tersebut menurut Santosa(2017) didalam buku berjudul “administrasi publik teori dan aplikasi *good governance*” mengemukakann bahwa dalam definisi dari Easton merupakan pemerintah mampu bertindak dengan otoritatif kepada masyarakat, hal apapun yang telah dipilih oleh pemerintahan dalam bertindak ataupun dengan tidak berindak dapat terungkap didalam alokasi nilainya.

Menurut arti lainnya berdasarkan *Harold D.Laswell* dan *Abraham Kaplan* (dalam Santosa,2017) menjelaskan bahwa kebijakan merupakan sebuah nilai, proyek serta praktik. Pengertian tersebut mirip dengan pengertian dari Laswell dan Kaplan dengan mengingat dari pengertian *Carl Fredirch* dalam konsep kebijakan yaitu memiliki sebuah tujuan, saran serta obyek yang jelas. Menurut Presthus dalam buku Santosa (2017), mengemukakan bahwa kompleks sebuah permasalahan pada social serta politik yang menjadi pmerlasahan ditengah masyarakat yang menjadikannya sebuah kebijakan publik.

Kebijakan publik memiliki prosesnya, dikutip dari buku berjudul ”*Teori Administrasi Publik*” karya dari Pasolong(2014) Mmenurut ahli *Dunn* menjelaskan bahwa proes kebijakan tersebut dinataranya yaitu Penetapan pada agenda kebijakan tersebut, mengadoptsi kebijakan publik, pengimplementasian kebijakan publik dan evaluasi kebijakan publik.

Dalam bukunya Thoha yang berjudul ”*Dimensi dimensi Pirma Ilmu Administrasi Negara*” menjelaskan didalam arti yang luas kebijakan publik memiliki dua macam aspek yang pokok diantaranya yaitu :

- a. Kebijakan merupakan dari praktik social, sehingga kebijakan tersebut diciptakan dari pemerintah dengan berasallkan dari kejadian ditengah masyarakat. Kejadian tersebut yang tumbuh didalam praktik kehidupan masyarakat serta tidak kejadian yang beridiri sendiri.

- b. Kebijakan merupakan kejadian yang tumbuh untuk perdamaian dari pihak yang sedang berkonflik maupun untuk menciptakan dorongan kepada semua pihak untuk menetapkan tujuan bersama.

Dikutip dari buku “*Ilmu Administrasi Negara*” penulis dari Anggara(2016) bahwa kebijakan publik memiliki pengaruh yang sangat penting kepada masyarakat negara. Hal tersebut juga didukung oleh *Hoogerwerf* yang dikutip pada buku “*Ilmu Administrasi Negara*” bahwa kebijakan publik memiliki tujuan yang penting diantaranya seperti :

- a. Menjaga ketertiban
- b. Memajukan pada pertumbuhan masyarakat didalam berbagai hal
- c. Menggabungkan berbagai aktivitas
- d. Membagi berbagai dari benda material serta yang nonmaterial.

Dari kutipan diatas didapatkan bahwa kebijakan publik memiliki tujuan serta kepentingan kepada masyarakat.

Dikutip dari buku yang berjudul “*Analisis Kebijakan*” menurut ahli yaitu Dunn(1990) dalam Wahab(2008) menjelaskan isu kebijakan publik terbagi menjadi empat kategori besar diantaranya yaitu pada isu utama, sekunder, fungsional, serta minor.

Kebijakan publik memiliki berbagai jenis seperti yang dijelaskan didalam buku “*Teori Administrasi Publik*” karya Pasolong(2017) menjelaskan bahwa terdapat ahli yang menjelaskan jenis – jenis kebijakan publik tersebut diantaranya dari Nugroho(2006:31) menyatakan bahwa kebijakan publik sendiri terbagi menjadi tiga diantaranya yaitu :

- a. Makro

Kebijakan makro merupakan kebijakan yang memiliki sifat umum.

- b. Meso

Kebijakan Meso merupakan kebijakan yang memiliki sifat menenga maupun sifat yang memperjelas mengenai pelaksanaanya, pada kebijakan tersebut memiliki contoh seperti pada kebijakan dari menteri, peraturan dari gubernur, bupati serta peraturan dari wali kota.

c. Mikro

Pada kebijakan mikro merupakan kebijakan yang memiliki sifat mengatur didalam pelaksanaan maupun pada implementasi tersebut dari kebijakan publik sebelumnya sehingga kebijakan publik yang telah dikeluarkan oleh aparatur negara yaitu dibawa dari Menteri, gubernur, walikota dan bupati.

Santosa(2017) mengemukakan bahwa untuk memutuskan sebuah kepentingan publik merupakan hal yang sulit. Kesulitan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu :

- a. Administrasi pemerintahan memiliki cakupan luas serta kebijakan publik yang memiliki aneka ragam. Sehingga kebijakan publik tersebut mampu diterapkan dari skala nasional hingga pada skala desa.
- b. Memiliki banyak jenis didalam isi kebijakan publik, diantaranya seperti mengenai hubungan antar luar negeri hingga pengaturan pada pedagang kaki lima.
- c. Perumusan mengenai kebijakan publik yang dikerjakan oleh pemerintah maupun yang tidak.

Menurut ahli yaitu *Robert Presthus* dalam buku Santosa, (2017) mengemukakan bahwa terdapat empat pendekatan didalam menganalisis kebijakan publik diantaranya yaitu :

- a. Studi kebijakan sebagai dari sebuah proses *output* didalam sistem rasional,
- b. Pendekatan pada studi kasus,
- c. Pendekatan pada kebijakan sebagai dari proses *output*
- d. Studi kebijakan sebagai dari satu variable yang independen didalam proses dari kebijakan.

Tahap dalam *Policy Making* menurut ahli yang dikutip pada buku “*Enam Dimensi Administrasi Publik*” penulis Keban(2008) yaitu menurut ahli Russel(1997) mengemukakan dalam pembuat kebijakan terdiri dari Agenda Setting dari isu kebijakan, keputusan dalam melakukan maupun tidak melakukan sebuah kebijakan, implementasi pada kebijakan publik, evaluasi mengenai program serta menganalisis pada dampak dari kebijakan tersebut dan timbal balik dengan memutuskan apakah kebijakan tersebut diperbaiki maupun dihentikan.

Kebijakan publik memiliki proses didalamnya untuk menyelesaikan permasalahan publik di negaranya. Menurut ahli yaitu Dunn dalam buku Santosa(2017) mengemukakan bahwa dalam memecahkan masalah di negara maka kebijakan publik memiliki proses diantaranya yaitu :

- a. Penetapan agenda kebijakan publik.
- b. Adiksi kebijakan publik
- c. Implementasi kebijakan publik
- d. Evaluasi kebijakan publik.

Sementara menurut ahli lainnya yaitu James Anderson(1979) dalam Santosa(2017) mengemukakan bahwa proses kebijakan publik diantaranya yaitu :

- a. Formulasi permasalahan publik
- b. Formulasi mengenai kebijakan publik
- c. Penentuan mengenai kebijakan publik
- d. Implementasi kebijakan publik, dan
- e. Evaluasi kebijakan publik.

Maka dari dua ahli tersebut Santosa(2017) mengemukakan bahwa dalam proses pada perumusan sebuah kebijakan publik yaitu analisis kebijakan publik, pengesahan pada kebijakan publik, implementasi kebijakan publik tersebut, serta evaluasi pada kebijakan publik yang telah diimplementasikan. Kebijakan publik tersebut merupakan upaya pemerintah didalam menyelesaikan masalah publik yang telah dihadapinya. Serta dengan menyelesaikan masalah dengan kebijakan publik ini untuk menyelesaikan masalah di tengah masyarakat maka akan makin terasa mengenai administrasi publiknya.

Didalam buku berjudul ”*Dimensi – dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*” karya Thoha (2003) menjelaskan bahwa menurut Gerald Caiden merumuskan terdapat ruang lingkup didalam studi kebijakan publik, diantaranya yaitu :

- a. Adanya Partisipasi publik
- b. Adanya kerangka kerja kebijakan.
- c. Adanya strategi kebijakan
- d. Adanya kejelasan tentang kepentingan publik
- e. Adanya pelembagaan dari kemampuan kebijakan publik.

1.6.4. Implementasi Kebijakan

Implementasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan makna dari pelaksanaan maupun penerapan. Hal tersebut berkaitan oleh pada sebuah kesepakatan, perencanaan maupun pada sebuah penerapan kewajiban. Implementasi kebijakan tidak hanya hubungan pada mekanisme didalam keputusan politik kedalam prosedur dengan saluran birokrasi, namun lebih kepada berhubungan terhadap masalah maupun konflik dengan keputusan serta siapa yang akan memperoleh dari suatu kebijakan tersebut. Dikutip dari buku "*Analisis Kebijaksanaan*" penulis Wahab.S.A(2008)

Implementasi kebijakan menurut Wahab dalam buku "*Ilmu Administrasi Negara*" penulis dari Anggara(2016) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan merupakan sebuah proses didalam pelaksanaan mengenai keputusan kebijakan yang berbentuk undang – undang, keputusan peradilan, eksekutif, peraturan dari pemerintah maupun dekrit dari presiden.

Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan maupun penerapan sebuah kegiatan pemerintahan untuk mengatasi sebuah tujuan maupun untuk menyelesaikan permasalahan publik ditengah masyarakat.

Implementasi kebijakan menurut Pandji Santosa dalam buku "*Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*" merupakan aktivitas dilakukan dengan tujuan untuk melaksanakan sesuatu sebuah kebijakan dengan efektif Menurut ahli lainnya yaitu Jones dalam Sutojo(2015) mengemukakan implementasi sebagai dari sebuah proses dalam mendapatkan sumber daya tambahan yang dapat dihitung apa saja yang mampu dikerjakan.

Sementara menurut Grindle (dalam Mulyadi, 2015) mengemukakan bahwa implementasi adalah sebuah proses dari tindakan umum administrasi yang mampu diteliti pada tingkatan program tertentu. Menurut *Merilee S.Grindle* dalam Subarsono (2011) untuk mencapai keberhasilan Implementasi Kebijakan yaitu dipengaruhi oleh variable yang besar sebanyak dua yaitu kebijakan serta lingkungan implementasi.

Implementasi Kebijakan menurut ahli yaitu dari *George C. Edward III* Dalam Subarsono, (2011) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dapat dipengaruhi empat variable yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, serta struktur birokrasi.

Sementara menurut Endwards (dalam Budi Winarno, 2008) mengemukakan implementasi kebijakan yaitu sumber yang meliputi dari staf yang memiliki keahlian yang baik didalam menjalankan tugas, wewenang serta fasilitas untuk melaksanakan pelayanan publik.

Implementasi Kebijakan menurut ahli yaitu Oktasari(2015) mengemukakan implementasi adlaah penyediaan sarana untuk dapat dilaksanakan dengan memberikan sebuah dampak tertentu. Tertentu tersebut maksudnya yaitu hal dari pemerintah berupa peraturan maupun undang – undang dan keputusan serta kebijakan yang dibuat lembaga pemerintahan.

Menurut Gordon (Mulyadi, 2015) implementasi yaitu berhubungan dengan berbagai dari kegiatan dengan diarahkan kepada relaisasi program. Menurut Masmnian dan Satir(1983) didalam buku "*Studi Implementasi Keibjkan Publik*" penulis Rulinawaty Kasmad.Sos., M.SI. yaitu Implementasi kebijakan merupakan dari pelaksanaan dengan berbagai dari keputusan yaitu eksektuif, legislaif serta dari yudikatif.

Menurut *Dunn* didalam buku "*Implementasi Keibijakan Pulibk*" karya Dr. H. Tachjan,M.S.i(2006) implementasi kebijakan dapat dibagi diantaranya yaitu *Policy Input serta policy proses*" *Policy Input* yaitu seperti pada sumber daya, sementara pada *policy proses* yaitu dapat berupa pada kegiatan dari organisasi maupun kegiatan dari administrasi yang membentuk pada masukan kebijakan kedalam *output* serta dampak dari kebijakan tersebut.

Menurut Edwards III dalam Herabudin, (2017:128) implementasi kebijakan dapat dipengaruhi dengan empat variable diantaranya yaitu:

a. Komunikasi

Komunikasi adalah sbbuah faktor yang penting dalam implementasi kebijakan, komunikasi sendiri merupakan hal yang sangat didalam penentuan mengenai keberhasilan didalam capaian sebuah tujuan didalam implementasi kebijakan(Agustino,2006). Dengan implementasi sebuah kebijakan publik ini

yang kompleks dan dituntutnya sebuah kerjasama dari berbagai pihak maka diperlukannya faktor yang penting yaitu komunikasi untuk mencapai tujuan bersama serta pemahaman yang sama satu sama lain.

b. Sumber daya,

Dalam implementasi kebijakan tersebut untuk dapat terlaksana dengan baik serta tepat dan efektif maka sangat dibutuhkannya sebuah sumber daya yang baik pula. Sumber daya merupakan faktor yang penting juga didalam implementasi kebijakan. Hal ini didukung oleh pernyataan dari ahli yaitu Edward III (Winarno, 2005) yang menyatakan bahwa sumber daya memiliki peranan penting didalam implementasi kebijakan. Tidak adanya sumber daya maka kebijakan tersebut hanyalah sebuah dokumen yang berada dikertas. Walaupun terdapat perintah mengenai implementasi dengan tepat, jelas serta konsisten namun bila didalam pelaksanaannya terdapat kekurangan yaitu pada sumber dayanya maka dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut menjadi tidak dapat berjalan dengan efektif.

c. Sikap pelaksana dan

Menurut Edward III (dalam Winarno,2005) sikap pelaksanaannya tersebut yaitu sebagai dari sikap pelaksana dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut memiliki sikap yang positif dengan seperti adanya sebuah dukungan kepada implementasi kebijakan tersebut sehingga implementasi dari kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan ssesuai. Dalam sikap pelaksana sendiri bila memiliki sikap yang tidak mendukung yaitu menolak dari sebuah kebijakan merupakan sikap yang negatif dalam implementasi kebijakan maka hal tersebut akan menyebabkan sebuah kendala dan mampu menimbulkan sebuah konflik didalam implementasi kebijakan tersebut.

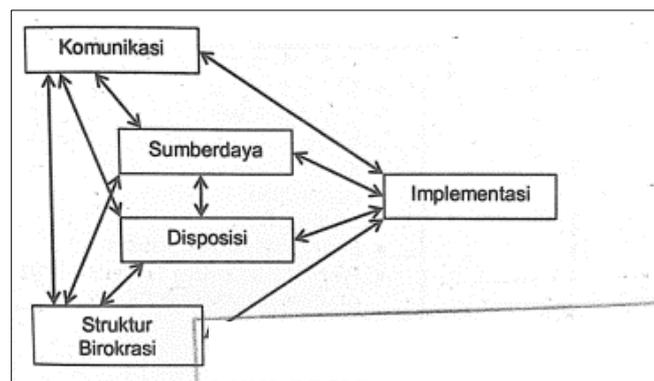
Sikap pelaksana berdasarkan ahli yaitu *Van Meter dan Van Horn* dalam Agustino(2006) menyatakan bahwa mengenai sikap pelaksana dari sikap menerima maupun sikap menolak dari pelaksana mampu mempengaruhi kepada keberhasilannya maupun kegagalan kepada berjalannya implementasi kebijakan tersebut.

d. Birokrasi.

Implementasi kebijakan berdasarkan birokrasi ini perlunya struktur dari birokrasi yang mampu memberikan dampak kepada efektif sebuah kebijakan sehingga mampu mempermudah keberlangsungan dalam implementasi

kebijakan. Berdasarkan *Edwards III* dalam Winarno(2005) mengemukakan bahwa dalam birokrasi memiliki karakter utama dalam keberjalanannya implementasi kebijakan yaitu didalam SOP *Standart Operational Procedure* yang menjadi tuntutan didalam internal mengenai aturan serta dalam keberjalannya organisasi.

Gambar 1.9.
Model Implementasi Edward III

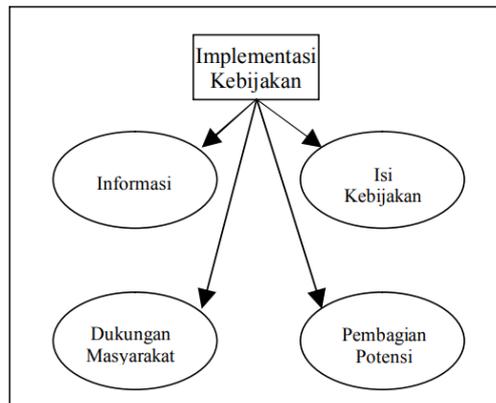


Sumber : Buku Perbandingan Administrasi Publik, Indiahono.D , 2009

Sementara Menurut Jan Merse didalam buku “*Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam fakta relitas*” karya Kadji.Y(2015) Implementasi kebijakan yaitu dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu :

- a. Informasi
- b. Isi dari kebijakan
- c. Dukungan masyarakat baik pada dukungan fisik maupun dukungan non fisik
- d. Pembagian pada potensi.

Gambar 1.10.
Model Implementasi



Sumber : Buku Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam fakta relitas, Kadji.Y(2015)

Gambar diatas menunjukkan bahwa didalam imlementasi kebijakan membutuhkan peran dari masyarakat yaitu berupa dukungan maupun partisipasi didalam stakeholder. Sehingga peran maupun partisipasi dari masyarakat merupakan hal yang penting didalam implementasi kebijakan publik.

Batasan Implementasi Kebiakan pemerintah berdasarkan Wahab(2001) dalam buku “Studi Kebijakan Pemerintah” dalam Herabudin(2016) megemukakan bawah impelemntasi kebijakan mampu dilihat memlalu berbagai sudut pandang diantaranya yaitu :

- a. Perhatian utama terhadap pembuat kebijakan tersebut dengan berkos kepada “seberapa jauh kebijakan publik mampu tercapai serta alasan yang dapat menyebabkan pada keberhasilan maupun kegagalan mengenai kebijakan tersebut.
- b. Sudut pandang dari implementor, pada implementasi ini berfokus kepada “tindakakn dari pejabat maupun dari instansi untuk mencapai sebuah keberhasilan dari implementasi kebijakan tersebut”
- c. Sudut pandang grub target, implementasi kebijakan tersebut melihat pada “implementasi kebijakan mampu dapat merubah pada pola hidup serta mampu memberikan dampak yang positif pada peningkatan kualitas hidup termasuk kepada pendapatan dari grub target”.

Herabudin(2016:117) dalam bukunya yang berjudul “*Studi kebijakan pemerintah*” penjelasan dari Wahab(2001) bahwa definisi tersebut dapat disimpulkan mengenai implementasi kebijakan adalah sebuah kegiatan maupun sebuah usaha yang telah dilakukan dari pelaksana kebijakan maupun dengan harapan untuk memperoleh sebuah hasil yang sesuai terhadap tujuan maupun sasaran dari sebuah kebijakan publik tersebut.

Dalam mengimplementasikan kebijakan sesuai terhadap rencana serta tujuannya, maka terdapat sebuah kondisi untuk mampu mendukung didalam implementasi kebijakan tersebut. Menurut Nurcholos(2007) dalam buku berjudul “*Administrasi Pemerintahan Daerah*” yaitu Arenawati(2013) kondisi yang mampu mempengaruhi kebijakan diantaranya yaitu :

- a. Dukungan serta penolakan berasalkan lembaga eksternal.
- b. Ketersediaan pada waktu serta sumber daya
- c. Mendapatkan dukungan sumber daya, semakin banyaknya sumber daya yang diperoleh semakin tinggi pula mencapai tujuan dari sumber daya tersebut.
- d. Memiliki kepatuhan didalam pelaksanaan kebijakan serta tujuan yang diciptakan pada tingkat koordinasi.
- e. Kemampuan dari para pelaksana kebijakan didalam analisis sebuah permasalahan yang muncul pada pelaksanaan kebijakan.

Implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip dalam buku *Studi kebijakan Pemerintah* karya Herabudin(2016) mendefinisikan implementasi terdapat enam variabel yang harus diperhatikan. Hal tersebut mampu mempengaruhi pada keberhasilan dari implementasi kebijakan :

- a. Standart dan sasaran kebijakan yang jelas.

Rincian mengenai standar dari kebijakan yang ingin dicapainya dengan melalui kebijakan serta standarnya untuk mengukur dari pencapaian kebijakan.

- b. Sumber daya

Keberhasilan dari implementasi kebijakan dapat dipegaruhi juga pada kemampuan dari sumber daya yang tersedia. Sumber daya sendiri diantaranya seperti pada sumber daya manusia didalam keberhasilan impementas ebijakan.

Selain itu sumber daya sendiri juga berupa dana maupun berbagai dari insentif yang mampu memberikan fasilitas yang efektif dalam pengimplementasian.

c. Komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas

Komunikasi merupakan hal yang penting dalam implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan setiap organisasi maupun kelompok memiliki standar maupun tujuan dalam kebijakan, sehingga perlunya komunikasi antar para pelaksana mengenai tujuan maupun standar organisasi. Keberhasilan implementasi juga menuntut pada mekanisme serta prosedur pada kelembagaan yang terstruktur serta lebih tinggi untuk mengontrol sehingga pada implementasi dapat berjalan sesuai dengan standar serta tujuan yang telah ditetapkan (Herabudin, M.Si, 2016).

d. Karakteristik lembaga/ organisasi pelaksana

Organisasi formal maupun organisasi informal mampu terlibat dalam implementasi kebijakan. Karakteristik dari organisasi pelaksana termasuk pada kompetensi dari agen pelaksana, tingkat hierarkis kontrol dari pelaksana saat pengimplementasian, serta dukungan politik (Herabudin, M.Si, 2016).

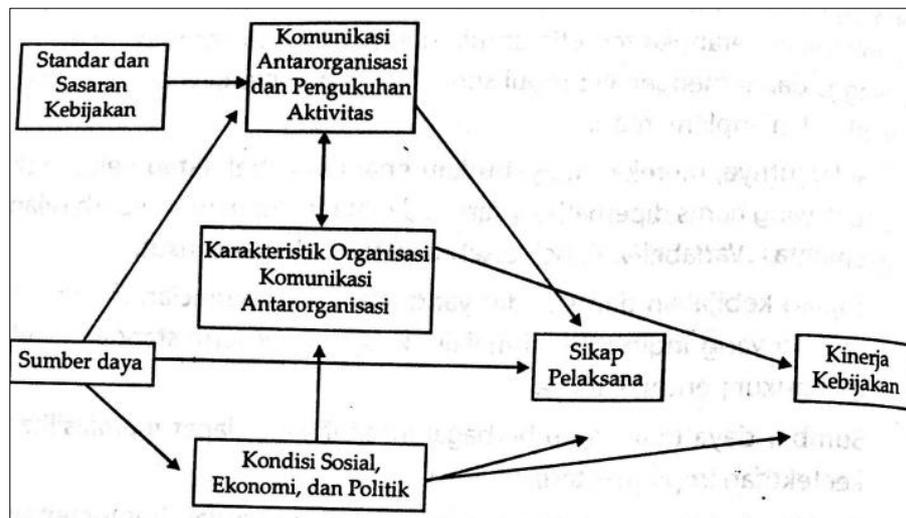
e. Lingkungan politik, sosial, dan ekonomi

Lingkungan eksternal dapat mendorong dari keberhasilan implementasi kebijakan publik. Pada lingkungan sosial, ekonomi serta politik yang tidak baik ataupun tidak kondusif dapat memberikan masalah dalam kegagalan pada kinerja implementasi kebijakan. Sehingga upaya pada implementasi kebijakan dapat dipengaruhi dari kondisi lingkungan eksternal.

f. Disposisi/ tanggapan atau sikap para pelaksana

Sikap pelaksana menurut *Van Meter dan Van Horn* dalam Agustino (2016) menyatakan mengenai sikap dari pelaksana dan sikap menerima dan menolak dari pelaksana mampu memberikan pengaruh pada keberhasilan maupun pada kegagalan dari berjalannya implementasi kebijakan.

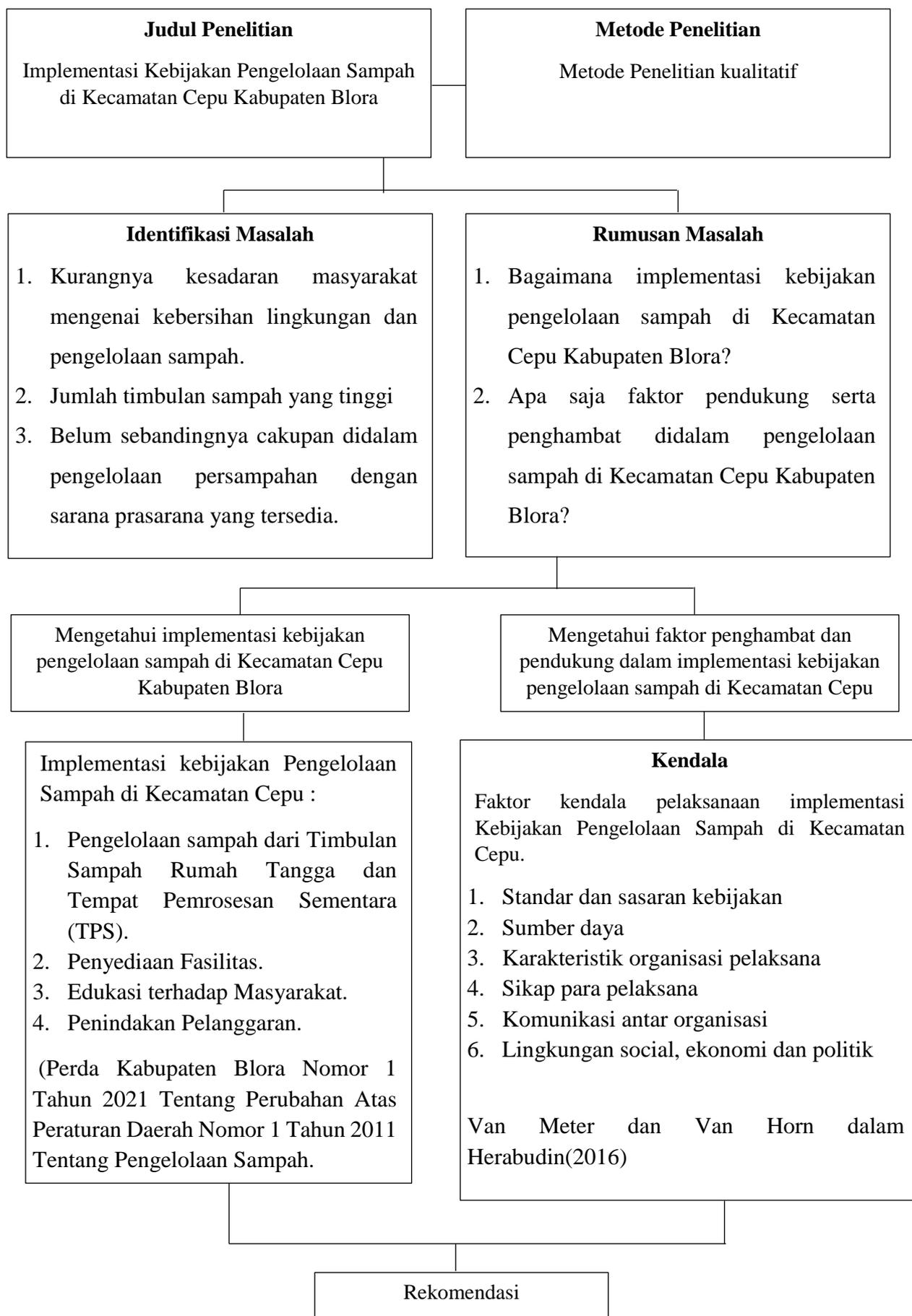
Gambar 1.11
Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn



Sumber : Buku Studi Kebijakan Pemerintah dari Filosofi ke Implementasi
(Herabudin, M.Si, 2016)

Sehingga dari dasar teori yang telah dipaparkan diatas dengan berdasarkan sumber – sumber didapat bahwa implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga pemerintahan untuk melaksanakan sebuah kebijakan yang telah tertuang didalam undang – undang maupun peraturan untuk dapat dijalankan dengan efektif dan tepat sasaran serta mampu memberikan dampak tertentu kearah sisi yang positif.

1.6.5. Kerangka Pemikiran



1.7. Operasional Konsep

Berpedoman dari beberapa teori yang telah dipaparkan sebelumnya, pada penelitian ini dengan melihat fenomena sebagai kajian peneliti dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora terdapat beberapa aspek sebagai indikator.

1.7.1. Implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah

- a. Timbulan sampah dari rumah tangga dan Tempat Pemrosesan Sementara (TPS) yang berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Peran pemerintah dan peran petugas dalam pengelolaan sampah dari timbulan sampah rumah tangga serta dari TPS dapat dikelola hingga pada tahap akhir dalam pengelolaan sampah.

- b. Penyediaan Fasilitas.

Peran pemerintah kecamatan maupun dari dinas dan peran masyarakat dalam menyediakan fasilitas berupa pengelolaan sampah serta kesadaran masyarakat dalam menyediakan fasilitas sampah rumah tangganya untuk dapat dikelola dengan baik.

- c. Edukasi terhadap Masyarakat

Peran pemerintah dan Dinas terkait dalam edukasi dan sosialisasi tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat yang sesuai terhadap peraturan daerah yang berlaku.

- d. Penindakan pelanggaran.

Peran pemerintah serta dinas dan masyarakat dalam menindak dan mencegah pelaku dalam pelanggaran kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Cepu.

1.7.2. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora

- a. Standart dan Sasaran Kebijakan

Standard dan sasaran kebijakan dalam penelitian ini melihat aktor pemerintah dalam menetapkan standart serta sasaran yang tepat sasaran kepada pengelolaan sampah di Daerah.

- b. Sumber daya

Sumber daya dalam penelitian ini melihat pada ketersediaan sumber daya manusia dalam menjalankan implementasi kebijakan ini serta sumber daya

sarana dan prasarana untuk fasilitas yang memudahkan petugas dalam menjalankan kebijakan dan sumber daya anggaran sebagai bentuk anggaran untuk penyediaan fasilitas dan sumber daya manusia.

c. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana dalam penelitian ini melihat pada karakter organisasi dalam menjalankan dan merespon kebijakan pengelolaan sampah melalui implementasinya organisasi.

d. Sikap para Pelaksana

Sikap para pelaksana dalam penelitian ini melihat pada bagaimana sikap dari pelaksana dalam merespon dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam lingkup implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

e. Lingkungan Sosial, ekonomi dan politik.

Lingkungan social, ekonomi dan politik dalam penelitian ini melihat pada bagaiman lingkungan eksternal yaitu social, ekonomi dan politik dalam memberikan pengaruh terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah sehingga tercapainya implementasi kebijakan yang tepat sasaran.

1.8. Fenomena Penelitian

Berdasarkan fenomena Penelitian dan permasalahan yang muncul dalam latar belakang penelitian maka muncul sebuah konsep sebagai berikut :

1. Implementasi, adapun gejala yang diamati yaitu :
 - a. Timbulan sampah dari rumah tangga dan Tempat Pemrosesan Sementara(TPS) yang berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
 - b. Penyediaan Fasilitas.
 - c. Edukasi terhadap Masyarakat
 - d. Penindakan pelanggaran.
2. Faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Cepu yaitu :
 - a. Standar dan sasaran kebijakan
 - b. Sumber daya
 - c. Karakteristik organisasi pelaksana
 - d. Sikap para pelaksana
 - e. Komunikasi antar organisasi
 - f. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Tipe Penelitian.

Tipe pada penelitian ini menggunakan sebuah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini menggunakan penelitian yang melalui deskripsi maupun hal yang menggambarkan sebuah fenomena yang terjadi di lapangan serta pada hubungan antar fenomena tersebut. Metode penelitian kualitatif ini tidak menggunakan pengukuran berupa numerik maupun berupa statistic.

1.9.2. Situs Penelitian.

Pada situs penelitian ini dilaksanakan pada Lingkungan daerah Kecamatan Cepu dengan menganalisis implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup didalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah kecamatan Cepu untuk dapat menciptakan sebuah lingkungan yang bersih serta sehat bagi masyarakat khususnya pada masyarakat kecamatan Cepu. Pada penelitian ini memilih daerah Kecamatan Cepu karena Jawa Tengah merupakan provinsi yang memiliki jumlah sampah yang tinggi serta Kabupaten Blora hanya memiliki dua Tempat Pembuangan Sampah Akhir yang menimbulkan keterbatasan pada tempat pembuangan Akhir. Selain itu fasilitas di TPA kecamatan Cepu yang masih kurang dan semakin berkembangnya sebuah daerah maka semakin banyak timbulan sampah yang dapat mempengaruhi pada lingkungan daerah. Sehingga hal tersebut dibutuhkannya sebuah implementasi kebijakan mengenai pengelolaan sampah di Kecamatan Cepu.

1.9.3. Subjek Penelitian.

Subjek penelitian ini merupakan sasaran dari peneliti untuk dapat memperoleh informasi mengenai penelitian. Subjek penelitian sendiri peneliti mengambil data dengan menentukan subjek penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun pada subjek penelitian ini yaitu :

1. Kepala Bidang Kebersihan Pengelolaan Sampah Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Limbah Bahan Bahaya dan Beracun.

Kepala bidang Kebersihan Pengelolaan Sampah Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Limbah Bahan Bahaya dan Beracun dipilih dikarenakan kepala Bidang merupakan aktor yang mengetahui mengenai seluk

beluk tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Blora khususnya di daerah Kecamatan Cepu.

2. Kepala Subkoordinasi bidang Pengelolaan Sampah.

Peneliti mengambil kepala Subkoordinasi bidang Pengelolaan sampah dikarenakan kepala subkoordinasi juga merupakan aktor didalam menjalankan implementasi dari kebijakan pengelolaan sampah baik di kabupaten Blora serta khususnya di daerah Kecamatan Cepu.

3. Petugas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora dan Kecamatan Cepu.

Pegawai ini merupakan aktor dalam keberjalannya dari implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Blora dan Kecamatan Cepu.

4. Masyarakat

1.9.4. Jenis Data.

Jenis data yang digunakan didalam penelitian ini dengan menggunakan data kualitatif yang seperti data non numerik dengan berisikan analisa dari sebuah kondisi untuk dapat membantu peneliti menentukan permasalahan. Data tersebut diantaranya yaitu seperti wawancara dari narasumber, catatan permasalahan, data berupa penelitian terdahulu maupun tulisan yang dapat menjadi kajian literature serta bukti dokumentasi sebagai bukti yang berupa gambar.

1.9.5. Sumber Data.

Sumber data pada penelitian ini yaitu informasi yang memiliki keterhubungan terhadap permasalahan yang dibahas didalam penelitian ini. Pada sumber data ini terdapat dua sumber data yaitu data primer serta data sekunder.

a. Data primier

Data primer dari penelitian ini yaitu dari wawancara dengan narasumber yang terlibat didalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Cepu.

b. Data sekunder

Data sekunder dari penelitian ini yaitu data yang diperoleh dengan cara tidak langsung. Data sekunder ini seperti data yang didapatkan dari website maupun sumber pustaka lainnya seperti berupa studi pustaka jural penelitian terdahulu, studi literatur, statistik dari Badan Pusat Statistik, perundang – undangan serta sumber lainnya yang mampu mendukung pada penelitian ini.

1.9.6. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik dalam pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan sebuah hasil penelitian dengan tepat, akurat, dan relevan. Pada pengumpulan data untuk penelitian ini digunakannya teknik sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah teknik dalam mengumpulkan data dengan berupa bentuk wawancara dengan dilakukan seperti Tanya jawab antara peneliti terhadap narasumber dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah informasi maupun persepsi dari narasumber ataupun information mengenai topik yang diteliti. Pada wawancara di penelitian ini ditujukan kepada subjek dari penelitian yang bersangkutan terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Cepu.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik dalam mengumpulkan data berbentuk gambar, video maupun bentuk tulisan. Pada penelitian ini dalam mengumpkan data dokumentasi berupa foto mengenai pengelolaan sampah masyarakat Kecamatan Cepu.

c. Pengamatan ataupun Observasi.

Pengamatan maupun observasi merupakan teknik dalam mengumpulkan data dengan cara dilakukannya melalui pengamatan secara langsung. Pada penelitian ini mengamati langsung terhadap objek yang diteliti serta data yang didapatkan dan dikumpulkan dengan baik berupa foto, video maupun dalam bentuk tulisan.

Observasi sendiri yang dilakukan oleh peneliti didalam penelitian ini yaitu dengan mengobsrvasi pada data mengenai jumlah dari personel dalam menerapkan implementasi kebijakan, jumlah dari sarana dan prasarana baik kabupaten Blora dan Kecamatan Cepu serta perilaku dari masyarakat mengai pengelolaan sampah rumah tangga.

d. Studi Literature.

Studi literature dilakukan untuk teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dari referensi bukum maupun pada jurnal penelitian yang mampu mendukung untuk penelitian ini.

1.9.7. Analisis dan Interpretasi Data.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan tipe analisis kualitatif. Analisis Data merupakan proses dari menyusun serta mencari dengan sistematis dengan data yang diperoleh dengan berdasarkan dari wawancara, catatan saat dilapangan, serta dokumentasi yang diorganisir serta dibuat kesimpulan sehingga dapat dipelajari maupun difahami (Dr.H. Zuchri Abdussamad, 2021 dalam buku "*Metode Penelitian Kualitatif*"). Analisis data serta interpretasi data ini dilakukan sebagai berikut :

a. Reduksi Data.

Proses dalam mengolah data yang telah dikumpulkan dari catatan – catatan di lokasi lapangan penelitian. Dengan diperoleh dengan alat penelitian dari wawancara dan observasi untuk memudahkan penelitian didalam pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian data.

Penyajian data dengan data informasi yang telah dikumpulkan sehingga terdapat kemungkinan untuk dapat diambil kesimpulan. Bentuk dari penyajian data kualitatif ini yaitu dapat berbentuk naratif dari catatan lapangan maupun grafik ataupun bagan sehingga dapat memudahkan untuk menarik kesimpulan maupun analisis.

c. Analisis Data

Atlas Ti merupakan sebuah aplikasi maupun *software* yang digunakan didalam penelitian kualitatif. Aplikasi *Atlas.ti* ini berasal dari singkatan yaitu *Archive fut Technik, Levensweltn Alltags Srache* yang berasal dari Bahasa Jerman yaitu penemunya bernama Thomas Muhr (Afriansyah, E.A. 2016). Dalam Bahasa Inggrisnya yaitu *Archive of Technology, Lfeworld and Everyday langage*.

Atlas. Ti memiliki fungsi dalam membantu mengenai organisasi, kode serta menganalisis data penelitian dengan terstruktur serta efisien. Aplikasi Atlas.ti ini bekerja dalam membaca bentuk data seperti gambar, video, audio, artikel, survey maupun dari transkrip wawancara (Afriansyah, E.A. 2016).

d. Kesimpulan

Data yang telah dikumpulkan dan menemukan hasil dari temuan penelitian perlu ditarik sebuah kesimpulan, sehingga dapat memberikan jawaban dari berbagai

pertanyaan yang ada didalam penelitian. Kesimpulan tersebut menjawab dari pertanyaan yang telah dibentuk oleh peneliti.

1.9.8. Kualitas Data.

Pada pengujian kualitas data peneliti menggunakan uji triangulasi. Triangulasi merupakan sebuah teknik didalam mengumpulkan data dengan cara mengecek dari berbagai sumber. Menurut Bungin(2008) menjelaskan bahwa triangulasi memiliki tiga macam diantaranya yaitu :

1. Triangulasi Teknik.

Triangulasi teknik didapatkan dari sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda.

2. Triangulasi Waktu.

Triangulasi waktu merupakan mendapatkan data yang sama namun dengan waktu yang berbeda.

3. Triangulasi Sumber.

Triangulasi sumber merupakan mendapatkan data yang sama namun dengan narasumber yang berbeda.

Pada kualitas data ini peneliti menggunakan metode triangulasi sumber dalam mendapatkan data yang sama dengan dilakukannya wawancara kepada narasumber sehingga mendapatkan sebuah data yang sama sesuai dengan kondisi di lapangan penelitian.